



# WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

## KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2018

EDISI JANUARI-FEBRUARI 2018 - VOLUME 70 / NOMOR 54

**RAPAT PIMPINAN (RAPIM)  
KEMENTERIAN PERTAHANAN  
TAHUN 2018**

**PEMANFAATAN ENERGI  
ALTERNATIF DEMI  
KETAHANAN ENERGI  
NASIONAL INDONESIA**

**IMPLEMENTASI CHANGE  
MANAGEMENT MELALUI  
PERAN PPID DALAM  
MENGELOLA TEKNOLOGI  
INFORMASI**



[www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id)



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia



kemhan



Kemhan\_RI



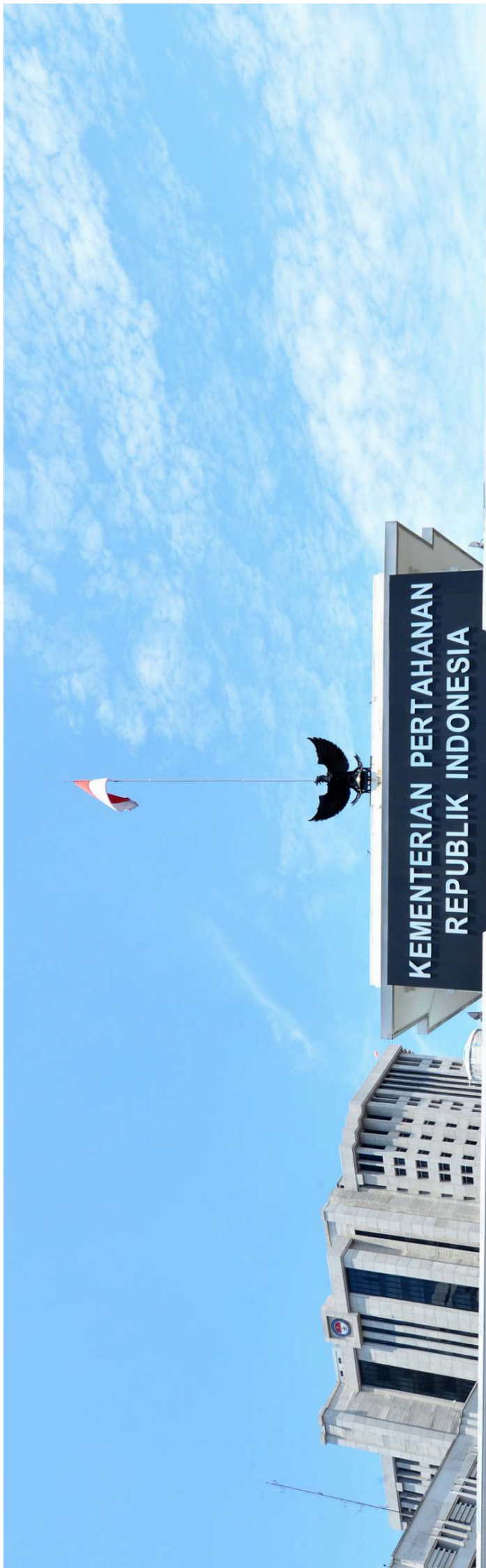
kemhanri

ISBN 1693-0231



INDONESIA

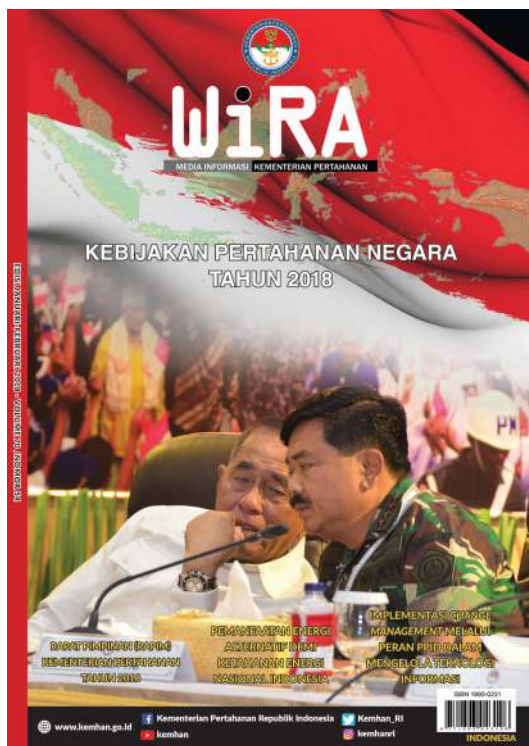




# **RAPAT PIMPINAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI TA. 2018 11 Januari 2018**







## DEWAN REDAKSI

### Pelindung/Penasihat:

Menteri Pertahanan  
Jenderal (Purn.) TNI Ryamizard Ryacudu

Sekjen Kemhan  
Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja

### Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan  
Brigjen TNI Totok Sugiharto, S. Sos

### Pemimpin Redaksi:

Kabid Kermainfo Puskompublik  
Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

### Redaksi:

M. Adi Wibowo, M.Si.  
Lettu Cku Lindu Baliyanto

### Desain Grafis:

Imam Rosyadi  
Mandiri Triyadi

### Foto:

Fotografer Puskom Publik Kemhan

### Percetakan & Sirkulasi:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Diterbitkan oleh:  
Puskom Publik Kemhan  
Jl. Medan Merdeka Barat 13-14, Jakarta  
Telp. 021-3829151





## ***Serambi Redaksi***

Para pembaca yang budiman,

Kami kembali menyapa para pembaca WIRA di tahun 2018 ini.

Dalam Wira Edisi pertama bulan Januari-Februari 2018, tim redaksi mengetengahkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan Kebijakan Pertahanan Negara diantaranya Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2018; Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018; Pemanfaatan Energi Alternatif demi Ketahanan Energi Nasional Indonesia: Implementasi *Change Management* melalui Peran PPID dalam Mengelola Teknologi Informasi; dan beberapa Berita Pertahanan .

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran, melalui email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan *online* di laman [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).





# Daftar Isi

## LAPORAN UTAMA

6

### RAPAT PIMPINAN (RAPIM) KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2018



Mengawali tahun 2018 Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyelenggarakan kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan bertempat di Kantor Kemhan, Jakarta. Rapim Kemhan Tahun 2018 merupakan suatu langkah strategis dalam mengevaluasi pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2017, serta menelaah prospek keberhasilan program kerja Tahun Anggaran 2018.

## ARTIKEL

16

### PEMANFAATAN ENERGI ALTERNATIF DEMI KETAHANAN ENERGI NASIONAL INDONESIA

Cadangan minyak bumi di Asia terus menurun selama dua puluh tahun terakhir. Cadangan minyak dan gas terbesar didominasi oleh Timur tengah, Rusia, Amerika dan Afrika.

21

### IMPLEMENTASI *CHANGE MANAGEMENT* MELALUI PERAN PPID DALAM MENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

*Change Management* merupakan sebuah konsep yang relatif baru yang bergerak untuk merubah organisasi melalui, restrukturisasi, *reengineering*, restrategisasi, akuisisi, pengurangan karyawan, program kualitas, dan pembaruan budaya.

## LAPORAN UTAMA

10

### KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2018



Pembangunan pertahanan negara mengacu pada sistem pengelolaan yang dilaksanakan secara komprehensif, sehingga diperlukan suatu kebijakan terhadap berbagai aspek terkait. Kebijakan pertahanan negara bersifat fleksibel dan adaptif yang diwujudkan melalui arah dan sasaran kebijakan.

## BERITA PERTAHANAN

27

*SOFT LAUNCHING "OUR EYES":*  
INDONESIA DAN LIMA NEGARA ASEAN KERJA  
SAMA PERTUKARAN INFORMASI STRATEGIS

29

LAWATAN MENHAN AS KE INDONESIA  
MEMBAWA AGENDA PERKUAT KERJASAMA  
PERTAHANAN

31

MENHAN RI - AUSTRALIA TANDATANGANI  
PERPANJANGAN KERJA SAMA YANG HABIS  
MASA BERLAKUNYA

33

KOREA SELATAN TINGKATKAN  
KERJASAMA DENGAN RI MENJADI  
KEMITRAAN KHUSUS

34

AWAL TAHUN 2018, KEMHAN TERIMA  
PESAWAT CN 235 DAN HELI DARI PT DI

## RAPAT PIMPINAN (RAPIM) KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2018

Oleh:  
Tim Redaksi

*"Memperkuat Sinergitas Kelembagaan Guna Mendukung Postur Pertahanan Yang Tangguh Melalui Profesionalisme TNI, Pengembangan Industri Pertahanan, Serta Kekuatan Rakyat Yang Memiliki Semangat Bela Negara".*



Mengawali tahun 2018 Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyelenggarakan kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan bertempat di Kantor Kemhan, Jakarta. Rapim Kemhan Tahun 2018 merupakan suatu langkah strategis dalam mengevaluasi pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2017, serta menelaah prospek keberhasilan program kerja Tahun Anggaran 2018. Rapim Kemhan Tahun 2018 yang diselenggarakan selama 2 hari tanggal 10 sampai dengan 11 Januari 2018 mengangkat

tema "Memperkuat Sinergitas Kelembagaan Guna Mendukung Postur Pertahanan Yang Tangguh Melalui Profesionalisme TNI, Pengembangan Industri Pertahanan, Serta Kekuatan Rakyat Yang Memiliki Semangat Bela Negara".

Pada hari pertama Rapim Kemhan dibahas mengenai refleksi Program Kerja Kemhan Tahun 2017 dan proyeksi Program Kerja Kemhan Tahun 2018 serta kegiatan bersifat internal Kemhan. Sedangkan pada hari keduanya

dilaksanakan penyampaian Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2018 dan penyerahan Amanat Anggaran TA. 2018 oleh Menhan kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan Sekjen Kemhan. Selain itu di hari kedua ini para peserta Rapim Kemhan mendapatkan pencerahan dari beberapa pejabat negara, salah satunya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo yang menyampaikan perumusan kebijakan nasional pengelolaan tata ruang dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara. Ada juga pencerahan tentang





kebijakan yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan peralatan pertahanan dihadapkan pada ketentuan hukum perdagangan nasional dan internasional yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. Lain halnya dengan Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara yang menguraikan tentang perumusan kebijakan perbaikan tata kelola keuangan negara di lingkungan Kemhan dan TNI.

Adapun pembicara lainnya yang hadir adalah Prof.Dr. Moh Mahfud MD.,S.H. berkesempatan untuk memberikan penjelasan tentang kelembagaan Kemhan dan TNI dengan lembaga terkait dalam mewujudkan pertahanan negara yang tangguh.

Saat membuka Rapim Kemhan di hari kedua, Kamis, 11 Januari 2018, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, mengutarakan situasi keamanan nasional yang ada di Indonesia sangat berpengaruh untuk kepentingan strategis dari negara-negara lain. Oleh karena itu, Menhan mengarahkan direktif Pengembangan Arsitektur Pertahanan Negara Indonesia kepada upaya untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional yang kondusif bagi stabilitas regional dan global.

Pengembangan Arsitektur Pertahanan Negara tersebut melalui pendekatan strategi pertahanan *Smart Power* yang merupakan kombinasi yang sinergis antara pembangunan kekuatan *Hard Power* dan kekuatan *Soft Power* yang berlandaskan kekuatan hati nurani. Guna mewujudkan direktif tersebut, selain memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia yang profesional, tangguh dan berwawasan Bela Negara, Indonesia perlu didukung dengan alat dan infrastruktur pertahanan yang handal, memadai dan mandiri.

Menhan menambahkan bahwa peran dari upaya mewujudkan stabilitas keamanan lingkungan strategis juga merupakan bagian integral dari kepentingan nasional Indonesia, sehingga Indonesia berkepentingan untuk mencermati perkembangan situasi yang mengancam perdamaian dunia dan stabilitas kawasan agar dapat mengambil langkah-langkah yang konkrit dan konstruktif.

Pada kesempatan Rapim Kemhan 2018, Menhan juga menyinggung Kebijakan Publik setiap Penyelenggara Negara yang diarahkan guna mewujudkan keamanan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam hal ini diartikan bahwa pengelolaan

pembangunan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara diarahkan untuk lebih pro pada kesejahteraan rakyat.

Menurut Menhan jika kesejahteraan masyarakat diupayakan untuk terus meningkat maka akan berujung kepada peningkatan keamanan nasional. Begitu pula dengan sebaliknya, jika keamanan nasional meningkat maka masyarakat akan lebih fokus untuk mewujudkan kesejahteraan. Hal ini dianggap Menhan bagaikan dua sisi keping mata uang. Bila salah satu sisinya tidak ada, maka uang tersebut tidak berlaku secara keseluruhan.

Lebih lanjut Menhan mengatakan, Indonesia diproyeksikan akan menjadi raksasa ekonomi baru dunia bersama beberapa negara lainnya dalam beberapa tahun mendatang. Proyeksi tersebut datang dari hasil riset yang dilakukan beberapa lembaga dunia, seperti *Standard Chartered Research*, *International Monetary Fund (IMF)* dan *City Investment Research and analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian yang menggambarkan kondisi Indonesia tersebut karena didorong salah satunya oleh meningkatnya kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang mandiri. Kekuatan industri pertahanan yang dimiliki oleh suatu negara nantinya akan mencerminkan kekuatan ekonomi negara itu sendiri. Seperti halnya beberapa negara-negara maju didunia saat ini, seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia dan Perancis yang maju perekonomiannya karena ditopang oleh industri pertahanan yang maju.

Menhan meyakini pembangunan industri pertahanan yang tengah digalakkan oleh Pemerintah pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan dan kekuatan pertahanan negara, serta mendorong pertumbuhan



kemandirian ekonomi menuju masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera. Dengan kata lain seiring dengan kemajuan Industri Pertahanan Indonesia, juga akan mendorong pertumbuhan dan kemandirian ekonomi dalam negeri yang sejalan dengan visi Nawa Cita Presiden RI. Terlebih lagi dengan adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, Indonesia memiliki modalitas yang potensial dan kemampuan dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Namun, hal itu masih perlu didukung dengan upaya dan komitmen bersama diantara pihak-pihak terkait untuk saling bahu membahu membangun industri pertahanan menuju kemandirian.

Menhan mengajak semua kalangan yang terkait untuk menunjukan dan meyakinkan kepada dunia bahwa produk Alutsista buatan Indonesia yang digunakan oleh TNI memiliki kualitas dan kemampuan yang handal dan prima. Dalam hal ini bisa dibuktikan dalam memperkuat sistem Pertahanan Negara Indonesia. Dunia akhirnyapun akan melihat kemampuan Alutsista produksi dalam negeri Indonesia,

untuk kemudian diharapkan memesan Alutsista dari Indonesia.

Menhan, Ryamizard Ryacudu dihadapan para peserta Rapim Kemhan, juga menyampaikan beberapa penekanan, antara lain pertama, Perwira TNI harus profesional pada bidangnya dan fokus pada tugas pokok yang diberikan. Selain itu setiap perwira TNI tidak di benarkan melaksanakan tugas sesuai selera masing-masing dan semauanya sendiri. Karna jika hal ini terjadi maka akan merugikan organisasi TNI.

Kedua, jadikan loyalitas adalah sebagai jati diri Prajurit TNI, karena disitulah inti dari kekuatan dan soliditas TNI. Ketiga, jadilah pemimpin yang senantiasa menjadi solusi dari setiap permasalahan. Pemimpin harus senantiasa mengedepankan Hati Nurani sebagai landasan tingkah laku dan perbuatannya. Karena Pemimpin yang memiliki hati nurani yang bersih tidak akan mudah menyerah dan bisa menjadi pribadi yang berjiwa besar, arif dan bijaksana. Selain itu pemimpin diharapkan senantiasa pandai merasa, bukan merasa Pandai, serta bermanfaat

bagi dirinya, keluarga, terutama untuk lingkungan dan bangsanya. Keempat, menjadikan Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai roh dan pedoman didalam menjalani kehidupan keprajuritan. Disamping itu menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam pedoman tersebut sebagai fondasi kultur Organisasi TNI yang solid dan profesional.

### **Mencari Terobosan Baru dalam Pelaksanaan Tugas Pertahanan**

Sementara itu di hari pertama kegiatan Rapim Kemhan Tahun 2018, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan, Marsenal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja mengatakan saat ini perkembangan lingkungan strategis dan nasional sangatlah dinamis sehingga kebijakan pertahanan negara juga harus selalu untuk dikaji. Menurut Sekjen Kemhan terobosan-terobosan baru yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pertahanan negara juga terus dicari. Selain dari suatu terobosan baru, tetap perlu adanya sikap antisipatif, kepekaan dan sikap







responsif terhadap dinamika tugas pokok Kementerian Pertahanan.

Dihadapkan dengan dinamika tersebut tugas Kementerian Pertahanan ke depannya pun juga semakin kompleks. Tugas ini memerlukan dukungan dan membutuhkan koordinasi serta sinergi dari berbagai komponen bangsa dan Kementerian/ Lembaga terkait. Seiring dengan hal itu Kemhan melalui kebijakan dan program kerjanya, berupaya terus mewujudkan sistem pertahanan negara yang tangguh. Disamping itu juga harus memastikan kebijakan dan program kerja tersebut terus diupdate dan disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis serta analisa ancaman.

Dalam Forum Rapim Kemhan ini Sekjen Kemhan juga menjabarkan beberapa pencapaian program Kementerian Pertahanan yang telah dilaksanakan, antara lain : Program Membangun TNI Yang Profesional; dengan pemenuhan kekuatan pokok minimum (MEF) sesuai Renstra. TNI juga telah dilengkapi dengan berbagai jenis Alutsista baru untuk semua matra serta telah membangun rumah negara untuk prajurit.

Program Pengamanan Perbatasan; Kementerian Pertahanan telah membangun jalan inspeksi dan patroli perbatasan di Kalimantan, Pos Pengamanan Perbatasan di Kalimantan, Papua dan NTT. Di Papua dan NTT dibangun jalur logistik.

Program Ikut Serta Mewujudkan Perdamaian Dunia; Program pengiriman Pasukan Perdamaian Dunia PBB terus dilaksanakan setiap tahunnya. Selanjutnya dalam berbagai forum kerjasama bilateral dan multilateral bidang pertahanan, Kementerian Pertahanan terus menyuarakan isu-isu keamanan regional penting yang

harus diantisipasi bersama, termasuk menginisiasi kerjasama pertahanan di kawasan seperti Patroli Laut Indomalphi dan Patroli Udara Trilateral. Program Membangun Industri Pertahanan Dalam Negeri Yang Kuat, Mandiri dan Berdaya Saing; Kementerian Pertahanan terus memberdayakan industri pertahanan dan program tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN); terus dilanjutkan dengan pembentukan kader bela negara di seluruh wilayah Indonesia. Antusiasme masyarakat dalam kegiatan bela negara sangat tinggi dan ini menjadi tantangan bagi Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan perangkat pendukung pembinaan bela negara tersebut.

Forum Rapim Kemhan Tahun 2018, dihadiri oleh Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Sekjen Kemhan, Irjen Kemhan, pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemhan serta sejumlah pejabat dari Mabes TNI, Mabes Angkatan dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Hadir pula beberapa pejabat perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait.\*\*\*



# KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2018

## 1. Umum.

Kebijakan pertahanan negara diselenggarakan untuk mengelola seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional guna mencapai tujuan pertahanan negara dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Pembangunan pertahanan negara mengacu pada sistem pengelolaan yang dilaksanakan secara komprehensif, sehingga diperlukan suatu kebijakan terhadap berbagai aspek terkait. Kebijakan pertahanan negara bersifat fleksibel dan adaptif yang diwujudkan melalui arah dan sasaran kebijakan.

## 2. Arah Kebijakan.



- a. Melanjutkan pembangunan pertahanan negara yang konsisten terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan NKRI serta Bhineka Tunggal Ika dengan mengikuti kebijakan politik negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia,

ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

- b. Berpedoman pada visi, misi dan program prioritas Pemerintah, termasuk kebijakan poros maritim dunia dan pengembangan kawasan, yang didukung dengan penggunaan teknologi satelit dan sistem drone; Kebijakan Umum dan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara serta Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2015-2019.

- c. Melanjutkan pembangunan Postur Pertahanan Militer yang diarahkan pada pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (MEF) TNI menuju Kekuatan Pokok TNI, berpedoman pada konsep pengembangan postur ideal TNI yang telah direncanakan dalam jangka panjang dengan mengacu pada aspek modernisasi alutsista, pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi maupun pemenuhan sarana prasarana yang didukung kemampuan industri pertahanan dan profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan prajurit.

- d. Memantapkan kerjasama dengan negara-negara sahabat dalam kerangka pengembangan kemampuan (*capacity building*) dan meningkatkan peran aktif dalam *Peacekeeping Operation* (PKO) dan membuat regulasi pengerahan kekuatan TNI dalam tugas perdamaian dunia

di bawah PBB dalam rangka diplomasi pertahanan.

- e. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan peran KKIP dalam merumuskan kebijakan nasional industri pertahanan.
- f. Mendukung pembangunan karakter bangsa melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara guna mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara serta dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

## 3. Sasaran Kebijakan.

- a. Terbinanya potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, serta sarana prasarana nasional, yang



merupakan potensi pertahanan untuk mendukung kekuatan pertahanan negara melalui pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi





muda,

dan penerus masa depan kita; pendidikan dan pelatihan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; serta kerjasama secara sinergis dengan K/L dan Pemda, maupun komponen bangsa lainnya, sebagai wujud penyiapan pertahanan negara secara dini.

- b. Terwujudnya kebijakan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan penelitian, pengembangan dan pengkajian serta analisa perkembangan lingkungan strategis, sumber daya nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, alat pertahanan yang sangat dinamis dengan mempertimbangkan Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) sesuai kebijakan pembangunan poros maritim dunia dan berbagai bentuk ancaman terhadap pertahanan negara.
- c. Terselenggaranya penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang sesuai

prioritas program legislasi nasional, yaitu: (RUU) Rahasia Negara, RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional, dan RUU Persandian; Revisi Undang-Undang TNI; pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan), ketentuan pelaksanaan lainnya, serta RUU komulatif terbuka tentang pengesahan perjanjian internasional bidang pertahanan, sesuai dengan program legislasi pertahanan.

- d. Terwujudnya penataan organisasi Kemhan dan satuan TNI baik terpusat maupun kewilayahan dengan memperhatikan kondisi geografis dalam rangka membangun daya tangkal yang sejalan dengan konsep pembangunan nasional. Penataan organisasi Kemhan sesuai dengan kebijakan umum pertahanan negara dengan memperhatikan struktur organisasi dengan mewujudkan terbentuknya Perwakilan Pelaksana Tugas Pokok (PPTP) Kemhan di daerah secara bertahap dan menyeluruh sesuai prioritas dengan mempertimbangkan kondisi wilayah terutama di daerah yang memiliki wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik. Terbentuknya kantor Atase Pertahanan Indonesia di negara Nigeria, Fiji, Bangladesh, Afganistan dan Irak. Tertatanya mekanisme fungsi Atase Pertahanan yang merupakan unsur TNI guna melaksanakan

kebijakan diplomasi pertahanan, menjalin kemitraan strategis dengan negara sahabat, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan dan TNI pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penataan organisasi TNI sesuai dengan kebijakan pengembangan TNI; pembinaan karier; peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan TNI; peningkatan pelayanan kesehatan bagi prajurit dan PNS; pembinaan hukum dan informasi publik; serta peningkatan tata kelola administrasi yang efektif dalam mendukung organisasi.

- e. Terwujudnya pengembangan, pembinaan dan penguatan intelijen antar lembaga terkait melalui pengembangan sistem informasi pertahanan negara (Sisinfohaneg) berbasis pertahanan siber; peningkatan profesionalisme SDM siber pertahanan; perluasan area deteksi dan perlindungan terhadap sektor pertahanan dan sektor lainnya; dan peningkatan operasi informasi melalui media sosial dalam rangka terwujudnya stabilitas nasional.
- f. Terwujudnya pembangunan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi guna pengembangan sistem informasi dan pengolahan data pertahanan negara berbasis pertahanan siber dengan memanfaatkan teknologi satelit untuk mendukung kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data serta informasi yang tepat, cepat, akurat, dan aman serta



kebutuhan interoperabilitas antar Angkatan dalam sistem komando dan pengendalian. Melakukan evaluasi dan negosiasi ulang terhadap pengadaan satelit komunikasi nasional untuk kepentingan militer dalam upaya penyelamatan Slot Orbit Satelit Geo 123 BT guna mewujudkan manajemen pengadaan yang lebih akuntabel, transparan dan sesuai kebutuhan.

- g. Terpenuhinya postur TNI dengan melanjutkan pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF) TNI yang didukung kemampuan industri pertahanan dan profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan prajurit; peningkatan kemampuan mobilitas berupa alat angkut berat dan daya tempur TNI serta; penyiapan pasukan siaga terutama untuk penanganan bencana alam, bantuan kemanusiaan, pengamanan wilayah perbatasan, dan untuk tugas-tugas misi pemeliharaan



perdamaian dunia serta keadaan darurat lainnya.

- h. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan keuangan melalui pola pengawasan *pre audit*, *current audit*, *post audit* dengan memanfaatkan teknologi *electronic government* dan

terlaksananya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas rekomendasi BPK dalam rangka mencapai opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas), serta meningkatkan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI), penguatan Reformasi Birokrasi, dan percepatan realisasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kemhan dan TNI.

- i. Terselenggaranya peningkatan Pembangunan Pengamanan Wilayah Perbatasan (PPWP) melalui penanganan garis batas dan melanjutkan pengembangan konsep sabuk pengamanan (*security belt*) secara bertahap dan terpadu, serta terwujudnya sinergitas antar pemangku kepentingan melalui koordinasi dan kerjasama dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pengamanan wilayah di perbatasan darat Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara



pembangunan dan pengembangan kekuatan TNI prioritas di wilayah Kepulauan Natuna, Merauke, Saumlaki/ Selaru, Biak dan Morotai.

- j. Terselenggaranya perlindungan, pengawasan, dan pengamanan terhadap seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis dari ancaman teroris maupun berbagai bentuk ancaman lainnya yang dapat membahayakan kelangsungan pembangunan nasional.
- k. Terlaksananya peningkatan pengerahan kekuatan laut dengan didukung kekuatan udara dalam upaya penegakan hukum, dan penindakan berbagai kegiatan ilegal di laut wilayah yurisdiksi nasional, dan terselenggaranya pemberdayaan potensi maritim di wilayah perbatasan, daerah-daerah terpencil, serta Pulau-Pulau Kecil Terluar/terdepan (PPKT) dalam rangka eksistensi kedaulatan negara.
- l. Terlaksananya pengerahan kekuatan darat dengan didukung kekuatan udara dalam upaya peningkatan pengamanan di daerah perbatasan darat dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan di wilayah yurisdiksi nasional dalam rangka mendukung eksistensi



Timur. Peningkatan pengelolaan terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar/Terdepan (PPKT) yang bersifat strategis dengan m e l a n j u t k a n





kedaulatan negara, serta mengoptimalkan pembinaan teritorial guna membangun ketahanan wilayah dengan didukung kebijakan satu peta.

m. Terlaksananya pengerahan kekuatan udara dalam rangka mengawal dan memperkuat patroli udara, serta pengamanan wilayah udara nasional berupa pengawasan, penjagaan dan penegakan hukum di udara wilayah yurisdiksi nasional dalam rangka penguatan poros maritim dunia, mendorong K/L untuk mempercepat proses pengambil alihan penguasaan *Flight Information Region (FIR)* melalui penataan dan penguasaan teknologi; penyiapan SDM dan infrastruktur; serta pembinaan potensi dirgantara.

n. Terwujudnya peningkatan gelar Trimatra terpadu di wilayah NKRI melalui kesiapan dan kesiapsiagaan pasukan, pengawasan dan pengamanan wilayah yurisdiksi nasional, optimalisasi pertahanan militer dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan nasional, serta mendukung stabilitas keamanan dalam negeri dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di seluruh wilayah NKRI.

o. Terwujudnya kerjasama internasional bidang pertahanan dengan menganut kebijakan politik luar negeri bebas aktif, yang mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim guna memperkuat dan menyelesaikan isu-isu keamanan bersama dengan

tertetap mengedepankan prinsip memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan, agar memberikan arah yang benar bagi pengelolaan keamanan regional untuk kepentingan bersama. Memperkuat diplomasi pertahanan dengan negara-negara sahabat yang diwujudkan diantaranya dalam bentuk kerjasama keamanan Trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina melalui kegiatan Patroli Maritim Terkoordinasi untuk mencegah dan memerangi perompakan dan terorisme; *Trilateral Air Patrol (TAP)* atau Patroli Udara Trilateral; Latihan Bersama Angkatan Darat dan pembentukan posko militer bersama untuk mempermudah

koordinasi, distribusi informasi dan data intelijen. Mewujudkan kerjasama *Our Eyes* bersama dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara lainnya, yang difokuskan pada kegiatan bidang intelijen melalui pertukaran informasi. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama di bidang pertahanan dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan guna menciptakan stabilitas keamanan dikawasan Pasifik. Serta, memperkuat kerjasama regional dengan *IORA (Indian Ocean Rim Association)* atau asosiasi negara-negara di kawasan Samudra Hindia guna mewujudkan keamanan maritim dalam mendukung visi Pemerintah mewujudkan negara





Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

- p. Terlaksananya peningkatan pelatihan pasukan secara profesional di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) guna mendukung pasukan pemeliharaan perdamaian dunia sesuai kebijakan politik negara untuk peningkatan pengiriman pasukan TNI yang profesional dalam memperkuat misi pemeliharaan perdamaian dunia, dengan didukung perlengkapan dan fasilitas yang memadai atas permintaan PBB sesuai target yang telah ditentukan. Peningkatan kontribusi pasukan pada misi pemeliharaan perdamaian dunia guna meningkatkan dukungan internasional terhadap pemerintah Indonesia dalam pencalonan sebagai anggota

tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 2019-2020.

- q. Pengintegrasian pembangunan Industri Pertahanan dengan memperhatikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta transfer teknologi melalui kerjasama K/L terkait dalam lingkup Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) guna mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing; peningkatan pemberdayaan industri nasional penunjang industri pertahanan dalam negeri untuk memproduksi komponen utama dan/atau penunjang, industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), industri bahan baku serta pemeliharaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)/ Alpalhan guna meningkatkan kerjasama, penelitian dan

pengembangan produk baru yang menunjang perekonomian nasional. Pengintegrasian ini dilakukan melalui upaya pemindahan kawasan industri pertahanan secara bertahap ke wilayah Lampung yang diawali dengan kajian dan survey lokasi.

- r. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan penelitian dan pengembangan melalui penciptaan dan inovasi teknologi Alpalhan dengan melibatkan pengguna teknologi, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan industri pertahanan nasional. Melakukan kajian dan evaluasi terhadap prioritas program strategis guna memastikan keberlanjutan program yang dapat mendukung kebijakan pembangunan industri pertahanan dan penguasaan







teknologi, yang meliputi kemandirian satelit pertahanan; pengembangan jet tempur KF-X/IF-X, pembangunan dan pengembangan kapal selam, pembangunan industri propelan/ mesiu, pengembangan roket nasional, pengembangan rudal nasional, pengembangan radar nasional, pembuatan kendaraan amfibi dan pengembangan tank sedang.

s. Terwujudnya peningkatan kesadaran belanegara melalui Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) guna mewujudkan warga negara yang cinta pada tanah airnya, memiliki etika, budi pekerti dan sopan santun, serta mempunyai karakter yang kuat dan tangguh, yang dilakukan secara terpadu, dan bersinergi antara Kementerian Pertahanan, K/L,

Pemda, serta komponen bangsa lainnya. Kegiatan bela negara dilaksanakan secara berlanjut melalui sosialisasi, pendidikan dan latihan di lingkungan pemukiman, pendidikan dan pekerjaan guna mencapai target 8 juta kader bela negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.

\*\*\*



# PEMANFAATAN ENERGI ALTERNATIF DEMI KETAHANAN ENERGI NASIONAL INDONESIA

Oleh:

**MUHAMMAD FERRY MUHROM, S.T., M.Si**

Personel Baranahan Kemhan

Alumni Universitas Indonesia



## PENDAHULUAN

Keberadaan Sumber Daya Alam yang tersebar di wilayah Indonesia, adalah satu hal penting yang mendasari kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu bentuknya disebut energi fosil. Energi yang berasal dari fosil-fosil yang tertanam selama berjuta-juta tahun di tanah Indonesia ini merupakan roda penggerak bagi perekonomian bangsa Indonesia. Sumber energi fosil merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan suatu saat akan habis, sehingga perlu untuk diperhatikan ketersediaan

dan keberadaannya. Belum lagi proses dari pembentukan energi fosil memerlukan waktu yang lama sehingga sangat diperlukan energi cadangan yaitu energi alternatif untuk menggantikan energi fosil. Sumber energi utama dunia atau sekitar  $\pm 80\%$  kebutuhan energi yang digunakan saat ini merupakan energi fosil yaitu minyak bumi, batubara dan gas alam. Oleh karena itu sebagai generasi bangsa penerus wajib untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengganti dengan energi yang dapat diperbaharui demi kelangsungan kehidupan manusia Indonesia.

Gambaran saat ini kondisi dari energi di Indonesia berdasarkan permintaan masih didominasi oleh energi fosil seperti Industri, transportasi dan rumah tangga yang masih ketergantungan dengan energi fosil. Pada tahun 2013 energi fosil menyumbang 94,3 persen dari total kebutuhan energi yaitu Minyak bumi sebesar 49,7 persen, gas alam 20,1 persen dan batubara 24,5 persen, dari 49,7 persen total kebutuhan minyak bumi dalam negeri, 50 persennya harus di impor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri dalam bentuk minyak





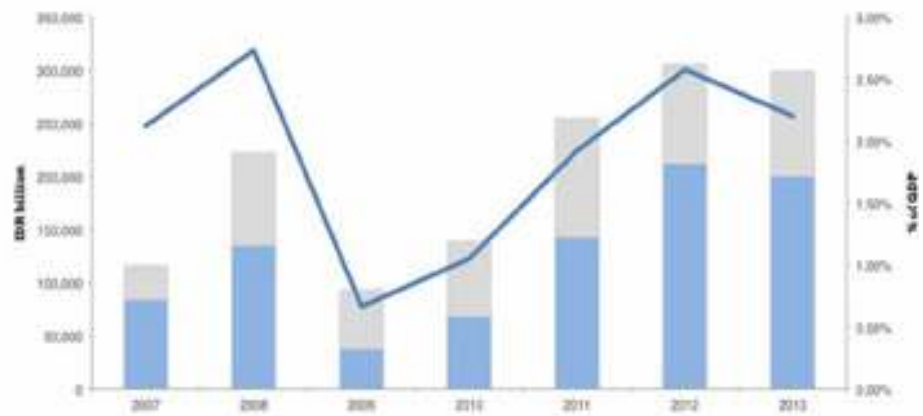
mentah dan produk minyak (*Dewan Analisis Strategis BIN, 2014 : 68*)

Fakta lain berbicara bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sampai saat ini masih mengimpor minyak bumi untuk mencukupi kebutuhan minyak di dalam negeri. Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan suatu komoditas yang sangat berperan penting dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Booming ketersediaan minyak sempat terjadi pada masa pemerintahan orde baru. Pemimpin bangsa ini juga berkeinginan agar semakin banyak rakyat dapat menikmati keberlimpahan minyak. Keterkaitan dengan hal itu maka ditetapkanlah kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Minyak yang disubsidi mengakibatkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) lebih murah dari harga keekonomiannya, walaupun biaya produksi yang dikeluarkan sangat tinggi tetapi pada waktu itu Pemerintah Indonesia masih mampu secara finansial. Fenomena ini terus berlanjut sampai defisit minyak menghampiri.

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri selama ini ditutup dengan subsidi pemerintah, akibatnya beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terus membesar. Tahun 2014 beban subsidi BBM Rp 199,9 triliun dari anggaran yang diperuntukkan untuk subsidi energi, yang mana setara dengan sekitar 2,5% PDB dan 25% dari anggaran total (*GSI 2014 : Edisi 1*).

Isu kenaikan harga BBM sering dijadikan isu politik. Kegoangan diprediksi akan marak melihat vitalnya peran BBM dalam

Grafik 1.2 Total Belanja Subsidi Bahan Bakar dalam Pengeluaran Absolut (Miliar Rupiah) dan sebagai % GDP



Sumber : Nota Fiskal dan RAPBN Bank Indonesia

mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, akibat dari kenaikan BBM memicu inflasi terhadap segala bahan pokok dan ujung-ujungnya akan merugikan rakyat. Pengaruh energi minyak bumi terhadap kegiatan rakyat adalah : (1) Sebagai input pabrik pupuk, (2) Berpengaruh pada petani, (3) Berpengaruh pada transportasi dan komunikasi (*Usman, 2013 : 1*).

### Potensi Energi Alternatif Nasional Indonesia

Dari sekelumit permasalahan di atas dapat kita asumsikan pengembangan sumber energi yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui menjadi penting untuk diteliti. Energi Alternatif dapat dimanfaatkan sebagai pengganti energi fosil di Indonesia. Energi fosil ini semakin terbatas ketersediaannya baik jumlah dan cadangannya. Masalah inipun akan menjadi permasalahan di masa mendatang, karena energi pengganti dari energi fosil yang di gadang-gadangkan yaitu energi alternatif pada tahun 2025 diprediksi belum bisa untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada masa mendatang.

Begitu strategisnya peran dari pada energi sehingga negara yang mempunyai banyak energi banyak menyimpan cadangan energi akan menguasai dunia. Maka Indonesia tidak boleh berdiam diri dalam penyediaan kebutuhan energi dalam negeri dan mencari sumber-sumber energi alternatif untuk kemakmuran bangsa dan Negara sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari sisi bauran energi, tantangan yang besar muncul dari masih tingginya ketergantungan pada bahan bakar fosil (khususnya minyak bumi). Hal ini berarti pangsa pemanfaatan energi terbarukan masih rendah dan ketergantungan berlebihan pada bahan bakar fosil dapat menimbulkan pertanyaan pada aspek keberlanjutan (*sustainability*) (*Perencanaan Pembangunan, 2014 : edisi 2*).

Cadangan minyak bumi di Asia terus menurun selama dua puluh tahun terakhir, cadangan minyak dan gas terbesar didominasi oleh Timur tengah, Rusia, Amerika dan Afrika. Cadangan minyak bumi Indonesia menurut Direktorat Jenderal oil dan gas terus menurun



dari tahun 2000 – 2012 sehingga dalam tahun 2012 tercatat 7,92 MBSD. Atas dasar kenyataan ini, maka Indonesia perlu mengadakan penelitian tentang alternatif strategi ketahanan energi Indonesia, apabila cadangan minyak bumi dan gas mulai menurun hingga habis.

Bagaimana dengan negara-negara lain melakukan ketahanan energinya? Negara Malaysia, kebijakan energi nasionalnya mempunyai tiga tujuan yaitu Pasakon, Penggunaan dan Lingkungan. Pemerintah Malaysia memberikan intensif fiskal bagi investor yang bergerak di bidang energi yang terbarukan, pembebasan pajak 70 % dari pajak penghasilan atau pemberian *investment tax allowance* sebesar 60% dari pengeluaran modal selama 5 tahun. Negara Jerman memasuki tahun 2000 peranan energi terbarukan meningkat dua kali-lipat dalam 10 tahun kedepan, alokasi anggaran penelitian untuk energi terbarukan meningkat, dukungan partai politik cukup tinggi di Jerman untuk kebijakan menemukan energi

alternatif, dan *Biofuel* (Biotanol) menjadi pilihan utama, (Noor Aisyah Kotamoralos, LIPI, 2008).

Sedangkan untuk Indonesia sendiri secara kenyataan memiliki sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) yang keberadaannyapun tersebar di wilayah nusantara. Energi baru terbarukan ini bukan hanya berkaitan dengan jumlah dan kapasitasnya, tetapi juga dengan keberagamannya. Sumber-sumber energi alternatif yang banyak di Indonesia diantaranya energi matahari, energi panas bumi, energi hidro, energi biomassa, energi laut (gelombang), energi angin serta uranium dapat dijadikan sumber energi primer pengganti energi minyak bumi (fosil) sangat potensial untuk dimanfaatkan secara optimal di masa yang akan datang.

Energi-energi ini memiliki potensi sebagai sumber energi alternatif yang banyak dengan jumlah yang besar dan tersebar hampir di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahpun berupaya untuk

penganekaragaman penyediaan dan pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi alternatif di Indonesia. Maka diperlukan diversifikasi penggunaan energi dari *non-renewable energy resources* ke *renewable energyresources*.

Energi Alternatif tersebut sudah diterapkan di Indonesia dalam skala kecil dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi yang sudah beroperasi di beberapa daerah di Indonesia seperti PLTP Komajang di Jawa Barat, PLTP Sibayak di Sinabung Sumatera Utara dan PLTP Lahendong Sulawesi Utara. Kekurangan BBM dalam Negeri saat ini merupakan waktu yang tepat untuk menata dan menerapkan dengan serius berbagai potensi tersebut. Meski saat ini sangat sulit untuk melakukan substitusi total terhadap bahan bakar fosil, namun implementasi sumber energi alternatif sangat penting untuk segera dimulai dari sekarang.

Tabel 2.1 Sumber energi alternative

| No | Tipe            | Sumber Daya                   | Kapasitas Terpasang (MW) | Ratio (persen) |
|----|-----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1  | 2               | 3                             | 4                        | 5 = 4/3        |
| 1. | Hidro           | 75.000 MW                     | 5.940,00                 | 7,92           |
| 2. | Panas Bumi      | 29.164 MW                     | 1.341,00                 | 4,60           |
| 3. | Biomassa        | 49.810 MW                     | 1.644,10                 | 3,30           |
| 4. | Energi Matahari | 4,80 kWh/m <sup>2</sup> /hari | 22,45                    | -              |
| 5. | Energi Angin    | 3 – 6 m/s                     | 1,87                     | -              |
| 6. | Laut            | 49 GW <sup>2)</sup>           | 0,01 <sup>1)</sup>       | 0              |
| 7. | Uranium         | 3.000 MW                      | 30,00 <sup>1)</sup>      | 0              |

Sumber : Dewan Energi Nasional 2013





## Konsep Ketahanan Energi Indonesia

Kebijakan energi suatu Negara berbeda dengan Negara yang lainnya, umumnya negara-negara di dunia khususnya negara-negara berkembang, dan kebijakannya mengedepankan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan ketersediaan energi nasional yang akan menimbulkan permasalahan. Pengembangan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan menjadi alternatif solusi untuk permasalahan energi nasional (Yusgiantoro, 2009).

Konsep ketahanan energi diperkenalkan oleh Negara Amerika Serikat pada tahun 1973 dan Negara Eropa Barat. Ketika terjadi embargo minyak oleh Negara Timur Tengah (Arab) sebagai Negara produsen utama minyak dunia, maka sejak itu ketahanan energi menjadi isu yang semakin diperhatikan dan terus berkembang. Terlebih dalam rangka membangun ketahanan energi dalam negeri (Dewan Analisis Strategis BIN, 2014 : 8).

Dewan Analisis Strategis BIN (2014 : 10) menyatakan, ada dua konsep ketahanan energi yaitu 5S dan 4A. Ketahanan energi Indonesia menganut mazhab 4A yaitu ketersediaan (*Availability*), Kemampuan (*Accessibility*), Biaya (*Affordability*), Penggunaan (*Acceptability*) yang disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan nasional. Ketahanan energi merupakan kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pada aspek lingkungan hidup.

Gambar 2.1 Aspek Ketahanan Energi Nasional



(Sumber : Dewan Analisis Strategis BIN 2014)

Indonesia menerapkan subsidi BBM sejak tahun 1950-an. Kebijakan subsidi ini masih bisa diterima sepanjang kebutuhan BBM domestik masih di bawah jumlah produksi minyak bumi yang menjadi hak Pemerintah. Kenyataannya dengan ukuran ini, Indonesia telah menjadi net oil importer sejak tahun 1997. Oleh karena itu, kebijakan yang berfokus kepada subsidi BBM selayaknya ditinjau ulang, dan menempatkan energi alternatif sebagai energi nasional dalam rangka penguatan ketahanan energi Indonesia.

Sistem Ketahanan Energi sangat penting bagi sebuah negara seperti Indonesia. Selain sebagai kemampuan merespon dinamika perubahan energi global (eksternal) juga sebagai kemandirian untuk menjamin ketersediaan energi (internal). Sistem Ketahanan Energi mengacu pada Kebijakan Pengembangan Energi sesuai Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007, dan energi memiliki peran bagi peningkatan Kegiatan Ekonomi dan Ketahanan Nasional.

## Kebijakan Energi Alternatif Nasional

Dari sisi regulasi yang berbicara mengenai energi keterbaharukan di Indonesia telah tertuang melalui perangkat-perangkat kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan ini mendorong penggunaan energi alternatif baru dengan menekan subsidi minyak bumi. Salah satu dasar hukum yang ada adalah Peraturan Presiden No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dasar hukum ini mengurai tentang pencarian energi baru periode 2006-2025 yang menargetkan pencapaian keragaman energi pada tahun 2025. Melalui pengurangan minyak bumi secara bertahap yaitu porsi minyak bumi maksimum 20%, sekarang masih 52%, gas akan ditingkatkan menjadi 30%, batubara akan ditingkatkan menjadi 33%, Panas bumi (*Geothermal*) 5%, *biofuel* menjadi 5%, maka energi baru dan terbarukan meningkat menjadi 5%.

Disamping itu kebijakan energi nasional Indonesia yang lain tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2014 tentang



Kebijakan Energi Nasional (KEN). Peraturan ini mengarah pada kebijakan tentang pengelolaan energi nasional yang berdasarkan pada prinsip-prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Disamping itu juga memprioritaskan penggunaan energi alternatif selain minyak bumi dengan meminimalkan penggunaan minyak bumi, dan mengoptimalkan energi alternatif dalam rangka terciptanya kemandirian energi di dalam negeri serta menciptakan ketahanan energi nasional (DEN, 2015 : 8).

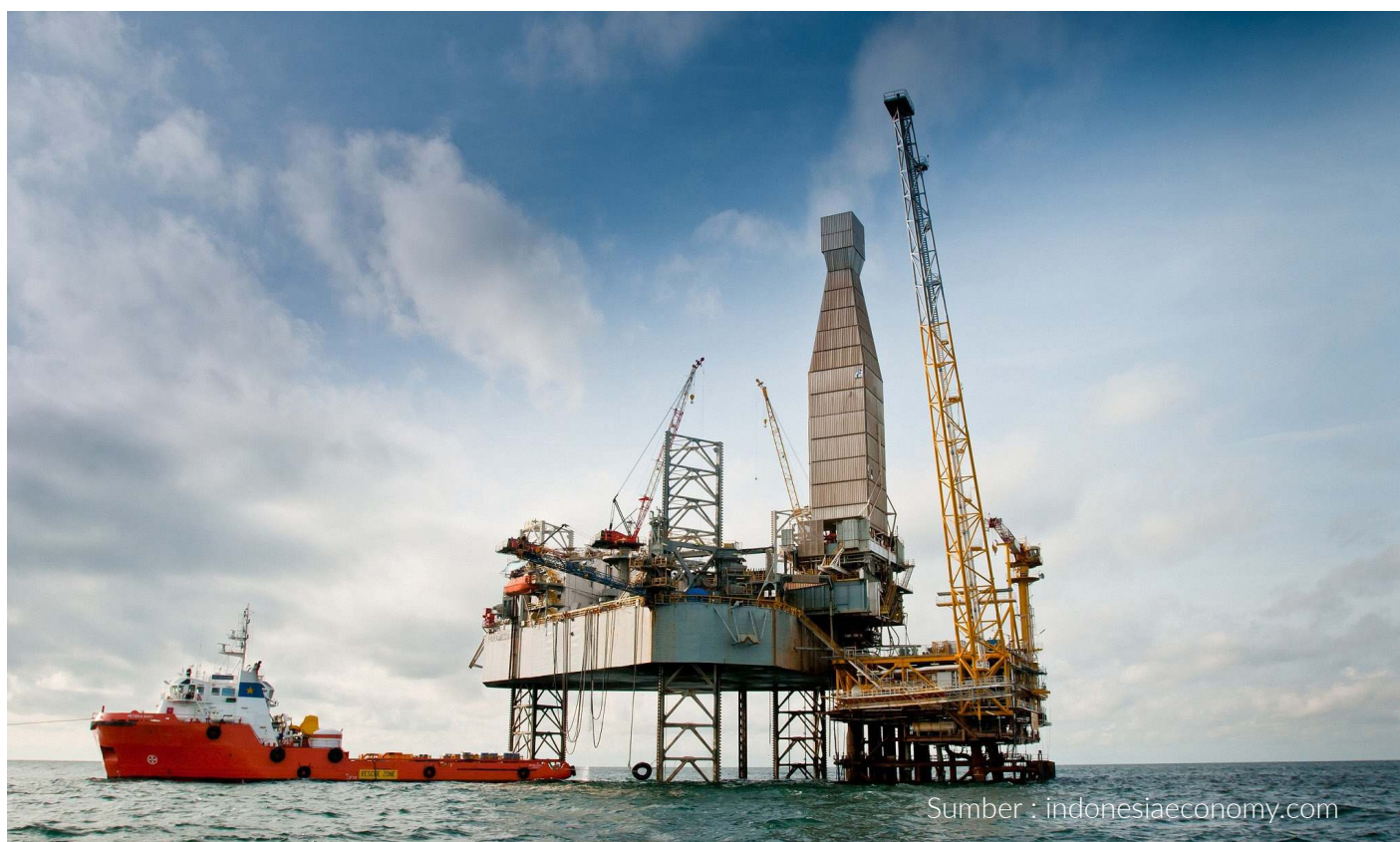
Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dalam negeri maka Indonesia harus memiliki cadangan penyangga energi yang dapat menjadi pasokan energi dalam waktu tertentu apabila terjadi krisis energi, yang merupakan tugas dan peran dari pemerintah untuk membuat suatu kebijakan energi nasional dalam rangka terciptanya

ketahanan energi nasional melalui bauran energi alternatif selain energi fosil berupa kebijakan energi nasional yang pro kepada kepentingan nasional.

Kemandirian serta ketahanan energi nasional dapat dicapai dengan cara mewujudkan kemandirian pengelolaan energi dalam negeri yang harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan dalam rangka perkembangan kebutuhan teknologi yang lebih maju untuk mengoptimalkan produksi sumber energi alternatif sebagai pengganti energi fosil yang tidak dapat diperbaharui.

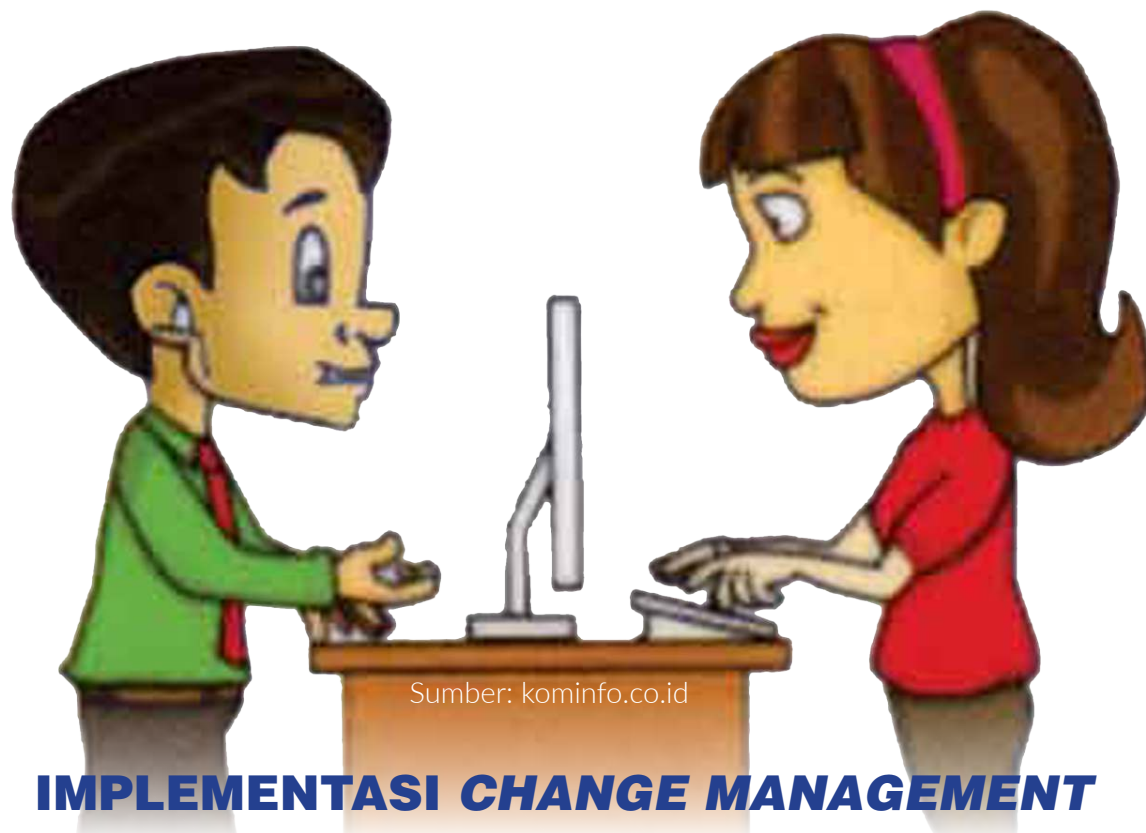
Salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan energi nasional jangka panjang adalah melalui pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil yang tidak terbarukan, khususnya minyak bumi, dengan cara mengoptimalkan sumber

energi baru seperti Gas bumi, Panas Bumi, Hidro, Biomassa, Surya, Angin, Gelombang (Laut) serta uranium, melalui strategi pengembangan energi alternatif dalam rangka ketahanan energi nasional Indonesia. Potensi energi alternatif ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Diharapkan strategi pengembangan energi alternatif itu dapat menghemat dan menghambat berkurangnya ketersediaan energi fosil di Indonesia, sehingga menciptakan ketahanan dan keamanan energi nasional untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.\*\*\*



Sumber : indonesiaeconomy.com





## IMPLEMENTASI *CHANGE MANAGEMENT* MELALUI PERAN PPID DALAM MENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Oleh:

Letkol Adm Bambang Kustiawan, S.E., M.M

Kasubbag Humas Bag Humas dan TU Roudhotulloh UNHAN

Dalam rangka memenuhi tantangan tugas yang diperkuat dengan tuntutan reformasi birokrasi disertai manajemen perubahan, penataan, dan penataan sistem manajemen aparatur, sudah sepantasnya penanganan informasi di organisasi modern menerapkan *Change Management* (Manajemen Perubahan). Hal ini diperuntukan dalam kemudahan pelaksanaan tugas dengan mengimplementasikan teknologi informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai informasi serta dokumentasi di suatu badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik mutlak memerlukan kehadiran *Change Management*. Tuntutan tersebut merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam era globalisasi dewasa ini yang mana juga menjadi barometer dari kemampuan PPID untuk mengelola sumber daya manusia sebagai penggerak informasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan kemampuan manajemen mengelola dan mengembangkan data yang pada akhirnya menjadi sebuah instrumen untuk dapat bersaing.

*Change Management* merupakan sebuah konsep yang relatif baru yang bergerak untuk merubah organisasi melalui, restrukturisasi,

*reengineering*, restrategisasi, akuisisi, pengurangan karyawan, program kualitas, dan pembaruan budaya. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang, PPID harus mampu mengakomodir segala yang dibutuhkan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Tentunya melalui implementasi teknologi atau sistem baru di lingkungan kerja guna mendukung bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkup PPID badan publik secara terbuka. Dengan keberadaan PPID yang berkualitas dan profesional maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan pengelolaan teknologi informasi

yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan organisasi untuk diawasi publik, dan penyelenggaraannya makin dapat dipertanggungjawabkan.

*Change Management* adalah sesuatu yang relatif baru, walaupun telah berkembang sejak lama. Pemikiran mengenai manajemen perubahan telah berkembang pada tahun-tahun sebelumnya. Para pionir yang mengkajinya secara akademis diantaranya John P. Kotter pada awal tahun 70-an, kemudian dilanjutkan oleh Kotter bersama dan S Cohen pada akhir tahun 80-an. Pemikiran

Kotter tersebut mengakibatkan *Change Management* adalah suatu perubahan yang bermanfaat dan signifikan bagi organisasi. Menurut Kotter kajiannya dibagi menjadi dua hal yang paling mendasar dalam menentukan perjalanan berikutnya. Kedua hal tersebut merupakan hasil dari tulisannya di *Harvard Business Review* yang sangat menggetarkan yakni (1) pimpinan komando atas membaca daftar berbagai kesalahan yang sering dibuat ketika berusaha menciptakan perubahan nyata. (2) pembaca mendapati bingkai perubahan 8 langkah yang sangat menarik. Sehingga tulisan Kotter dijadikan peta jalan dan membantu orang berbicara tentang transformasi, mengubah masalah, serta mengubah strategi. *Change Management* menurut Kotter

dan Cohen terdiri dari sejumlah praktek yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, merepresentasikan, dan mengubah apa yang mereka lakukan. Selain itu *Change Management* terdiri dari bentuk Transformasi budaya organisasi, globalisasi, baik dalam keseluruhan organisasi, sebuah kantor, sebuah departemen, atau sebuah kelompok kerja.

Pengertian dari peran PPID bukanlah semata-mata soal menyampaikan analisis kepada orang untuk mempengaruhi pemikiran, namun lebih berupa upaya membantu melihat kebenaran demi mempengaruhi perasaan. Kaitannya dengan penerapan *Change Management* adalah perihal







perubahan untuk memahami mengapa beberapa organisasi jauh lebih berhasil melakukan lompatan kemasa depan ketimbang lainnya.

### **Change Management Dalam Mengelola Informasi**

Salah satu aspek penting dalam *Change Management* yang akan selalu ada adalah perubahan sikap dan perilaku dalam rangka membangun teknologi informasi. Hal ini bisa terlihat pada kegiatan penyimpanan data yang semula secara *hard copy*, menjadi *soft copy* dan terpusat. Sehingga seluruh data baik yang sudah diproses maupun yang belum digunakan terpusat di ruang data sesuai dengan bidangnya dan tingkat penyelesaian masalah yang dibahas. Namun

terkadang, masih sering dilupakan bahwa penyimpanan data *soft copy* juga tetap dibarengi dengan *hard copy*, sebagai *back up* data yang telah diselesaikan maupun data yang masih mentah.

Dikalangan PPID suatu badan publik, dewasa ini juga tengah berusaha menciptakan perubahan dengan membangun informasi melalui kepedulian atas suatu organisasi. Namun Manajemen Perubahan di lingkungan organisasi membutuhkan adanya suatu sistem/tahapan yang dapat menjadi pedoman. Walaupun tidak harus kaku sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh Kotter, tetapi umumnya tahapan ini harus dilalui dengan solid walau tidak berurutan.

Keberhasilan peran PPID dalam mengupayakan perubahan organisasi senantiasa akan ditandai dengan penerapan sejumlah pendekatan yang terampil. Namun upaya yang berhasil mempunyai dua ciri: (1) para pemimpin melakukan pendekatan dengan kesadaran akan kekuatan dan keterbatasan dan (2) menilai serta mencermati situasi secara realistis.

Didalam realitas kehidupan berorganisasi terdapat dua hambatan dalam perubahan organisasi yaitu hambatan diluar organisasi dan di dalam organisasi. Hambatan dari luar organisasi terutama diciptakan oleh perubahan yang terjadi dengan cepat. Perubahan teknologi, ekonomi, sosial, politik dan lingkungan. Perubahan atas permintaan, keinginan, kebutuhan, nilai dan budaya dari para stakeholder menjadi kekuatan yang memaksa organisasi untuk berubah dan melakukan transformasi. Mengatasi kedua sumber hambatan

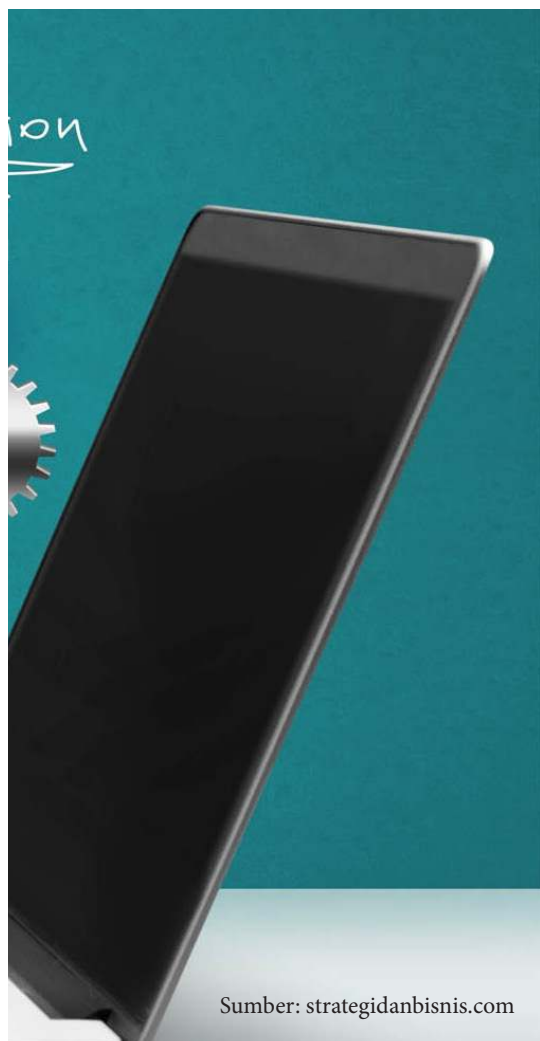
ini diperlukan komitmen yang tinggi, kepemimpinan, keberanian dan pengorbanan, perencanaan dan strategi yang tepat, karena tanpa itu semua pekerjaan reformasi akan mengalami kegagalan.

Kotter memberikan alasan mengapa organisasi dapat dan perlu berubah dan diperbaiki, meskipun beberapa orang berpendapat sebaliknya, karena organisasi dapat mengimplementasikan perubahan dengan baik. Metoda yang digunakan dalam keberhasilan transformasi didasarkan pada satu wawasan mendasar bahwa perubahan besar tidak akan terjadi untuk sebuah daftar yang panjang dari alasan-alasan.

### **Delapan Langkah Perubahan**

Menanggapi tantangan yang dihadapi tersebut, Delapan Langkah Perubahan menurut John Kotter (1996) dalam bukunya *Learning Change*, strategi-strategi untuk perubahan dengan mengidentifikasi kesalahan yang paling umum dalam mengefektifkan perubahan. Untuk itu delapan langkah sebagai Model Transformasi Kotter dalam mengelola transformasi agar berhasil, yaitu:

**1. Establishing a Sense of Urgency** (Menciptakan "*sense of urgency*"). Organisasi yang dinamis membutuhkan pengelolaan teknologi informasi yang tertib, baik dan menyeluruh. Namun, terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi pentingnya perubahan dalam pengelolaan teknologi informasi untuk melakukan pengembangan organisasi tersebut diantaranya adalah:



Sumber: strategidanbisnis.com



a. PPID. Tanggapan perubahan ini masih menjadi kendala yang memberatkan di beberapa organisasi terdahulu yang tidak melihat urgensi perubahan tersebut. Alasan penolakan perubahan oleh Pimpinan lebih umumnya dikarenakan segala kegiatan masih bisa ditangani. Sehingga kecendrungan rasa puas diri yang dirasakan pimpinan terhadap kinerja menjadi alasan penangguhan untuk pengelolaan teknologi informasi. Rasa puas diri yang terjadi pada pimpinan terdahulu bukan tanpa alasan, karena mereka merasa bahwa secara “teknis”, pengelolaan teknologi informasi tersebut masih sanggup melaksanakan tugasnya

b. Keberadaan unit organisasi. Menganggap bahwa tugas pengelolaan teknologi informasi tersebut hanyalah pekerjaan tambahan saja. Dampak yang paling besar dari organisasi tersebut adalah tidak jelasnya pengumpulan data dari tahun ketahun yang berakibat kepada lemahnya pendokumentasian dan penganalisaan.

c. Zona Nyaman. Sebelumnya, dengan tidak terlihatnya krisis akan perlunya pengelolaan teknologi informasi tersebut dirasakan menjadi zona nyaman bagi para pemimpin. Masih dapatnya dilaksanakan tugas di tingkat taktis dirasakan sudah mencukupi bagi para pimpinan yang tidak mengharapkan untuk memperhatikan dampak di tingkat strategisnya.

Rasa kekhawatiran akan melihat bukti keberhasilan dari pengelolaan teknologi informasi juga menjadikan tertunda dari tahun ketahunnya.

d. Evaluasi Jangka Panjang, Organisasi yang kecil yang menangani pengelolaan teknologi informasi sangat tidak memungkinkan dikarenakan setiap saat mereka hanya disibukkan untuk menganalisa setiap kegiatan dan menganalisa pengelolaan teknologi informasi secara keseluruhan yang telah dilaksanakan secara lebih strategis lagi dimasa depan tidak pernah dilaksanakan secara serius.

dibutuhkan dikarenakan selama satu dasa warsa belakangan ini semakin aktif terlibat dalam peningkatan informasi yang relevan dan berkualitas dalam proses pengambilan keputusan pimpinan. Visi ini juga terasa semakin strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, yang diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan organisasi yang baik, transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

**4. Communicating the Change Vision** (Mengkomunikasikan visi perubahan). Perubahan dapat terjadi, dengan adanya sambung rasa (*shared sense*) tentang masa depan yang didambakan. Terkait dengan hal untuk memahami

**2. Creating the Guiding Coalition** (Membentuk koalisi pemandu). Pembentukan Koalisi ini dilaksanakan dengan mengundang para pemikir dari beberapa organisasi yang berpengalaman dalam melaksanakan pengelolaan teknologi informasi. Selain itu juga dapat memberikan masukan yang menjadi pertimbangan akhir untuk mengambil keputusan akhirnya.

**3. Developing a Vision and Strategy** (Mengembangkan visi dan strategi). Visi Pengelola teknologi informasi adalah menjadi pengelolaan teknologi informasi yang rapih tertib dan berkesinambungan. Visi ini juga memegang kendali satu pintu keluar dan masuk urusan pengelolaan informasi dalam mendukung tugas pokok pertahanan. Pengembangan visi tersebut dirasakan semakin





tentang perlunya pengelolaan teknologi informasi. Beberapa langkah yang dilaksanakan diantaranya adalah;

- a. PPID mengelola teknologi informasi satu pintu dan mensosialisasikan pola pengelolaan teknologi informasi dengan mensyaratkan pengawak organisasi yang mahir computer.
- b. Mengundang rapat koordinasi internal antara Kepala PPID dan PPID pelaksana serta kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan teknologi informasi.
- c. Memberitakan kepada seluruh jajaran di Indonesia,

terbitan-terbitan, Koran dan situs-situs jaringan terkait dengan pembentukan teknologi informasi.

**5. Empowering Employees for Broad Based Action** (Memberdayakan karyawan untuk bertindak sesuai dengan visi). Pemberdayaan kemampuan personel yang dimilikinya dengan mengoptimalkan pelibatan seluruh personel dan elemen organisasi.

**6. Generating Short Term Wins** (Menetapkan target jangka pendek). Penugasan para personel yang menjabat untuk menentukan uraian tugas jabatan atau dikenal dengan Proses dan Mekanisme (Prosmek) Kerja masing-masing personel.

Penyiapan Prosmek tersebut dalam rangka menguraikan secara rinci tugas, tanggungjawab dan fungsi jabatan dari masing-masing jabatan yang menjadi tanggungjawab dimasing-masing jabatan.

**7. Consolidating Gains and Producing More Change** (Konsolidasi hasil perubahan dan mendorongnya lebih jauh). Dalam transformasi yang sukses, koalisi pengarah menggunakan kredibilitas yang diperoleh melalui keberhasilan-keberhasilan jangka pendek untuk bergerak maju dengan lebih cepat, bahkan menangani lebih banyak kegiatan yang lebih besar. Yang terpenting dalam PPID adalah membantu orang-orang atau badan dalam



mendapatkan informasi yang perlu untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas. Tahap ini mengalami sedikit hambatan untuk mengadakan konsolidasi perubahan dikarenakan pimpinan yang cepat berganti, yang sekarang sudah berbeda dari yang lalu yang mengakibatkan beberapa tujuan dari pimpinan yang lama tidak tercapai dalam mencapai target yang diinginkan. Kesenambungan kebijakan yang lama yang masih belum terwadahi dengan PPID baru membuat tersendatnya tahap pencapaian sasaran pembentukan organisasi.

**8. Anchoring New Approaches in the Culture** (Mengukuhkan hasil perubahan menjadi budaya). Kepemimpinan merupakan faktor pembentuk budaya yang paling dominan dalam organisasi. Oleh karena itu, diharapkan kepemimpinan pengelolaan teknologi informasi adalah seorang pimpinan yang mampu berfikir strategis dalam memberikan masukan kepada komando atas terhadap pengelolaan informasi akurat.

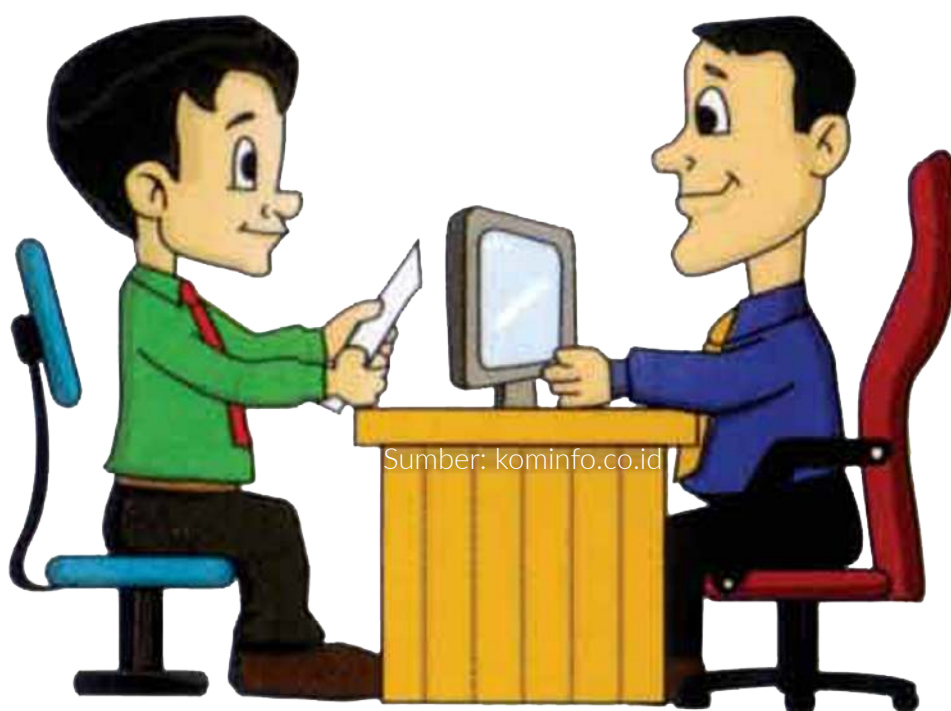
Delapan Langkah Perubahan ini mencerminkan sebuah urutan logis bagaimana sebuah organisasi khususnya PPID Badan Publik dapat mengembangkan strategi *Change Management*. Siklus tersebut menekankan bahwa *Change Management* merupakan sebuah proses. Setelah satu siklus tercapai, organisasi harus mempelajari hal yang baru, karena terdapat hubungan antara strategi generik, strategi perubahan, dan *Change Management*.

Program reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian PAN dan RB memikul tanggung jawab yang tinggi agar roda organisasi ini mampu mengikuti dinamika perubahan baik lingkungan nasional, regional, maupun internasional. Sejalan dengan revolusi informasi teknologi sebagai bagian tak terpisahkan dari globalisasi menuntut setiap organisasi untuk memanfaatkan IT pengelolaan teknologi informasi untuk peningkatan kinerja organisasi.

Pada konteks itulah pada ruang lingkup PPID sebagai pengelola arus informasi dan komunikasi dalam pengelolaan teknologi informasi merupakan suatu proses terformat dan terarah. Contohnya melalui PPID proses dalam mencerna informasi yang telah dimiliki dan mencari jenis informasi apa yang dibutuhkan oleh masing-masing kalangan internal dalam suatu organisasi bisa dapat berjalan lebih baik. Dengan arti lain

memberikan fasilitas kemudahan untuk mengakses informasi dari dalam maupun luar organisasi dan menyediakannya bilamana dibutuhkan. Nantinya kemudahan ini juga terasa dalam meng-update informasi terbaru tentang segala sesuatu hal dengan sasaran tertentu yang telah dicanangkan oleh pimpinan. Dengan demikian, sistem pengelolaan teknologi informasi yang terorganisir dengan mengintegrasikan data dan teknologi informasi sebagai media sudah terwujud. Salah satu faktor penting dalam menunjang perubahan budaya administrasi perkantoran, yang semula bersifat *paper work* secara bertahap berubah menjadi *paper less* karena ditunjang oleh fasilitas Teknologi Informasi. Demikianlah gambaran dari proses *Change Management* untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas PPID dalam pengelolaan teknologi informasi.

\*\*\*



Sumber: kominfo.co.id



## **SOFT LAUNCHING "OUR EYES" INDONESIA DAN LIMA NEGARA ASEAN KERJA SAMA PERTUKARAN INFORMASI STRATEGIS**



Dalam rangka memperkuat kerja sama regional menghadapi ancaman bersama di kawasan khususnya terorisme dan radikalisme, Indonesia bersama lima negara ASEAN lainnya yakni Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura telah menyepakati kerja sama di bidang pertukaran informasi strategis dengan nama "Our Eyes".

Kesepakatan kerja sama ini ditandai dengan acara "Our Eyes" Soft Launching melalui pemukulan gong dan penandatanganan *Joint Statement* secara bergantian oleh Menhan RI Ryamizard Ryacudu bersama Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Brunei Darussalam Dato Seri Pahlawan Haji Abdul Aziz bin Haji Mohd Tamit, Wamenhan Malaysia YB Dato' Sri Mohd Johari bin Baharum, *Undersecretary for Defence Operation DOD Philippines*

Cesar B. Yano, *Senior Minister of State for Defence and Foreign Affairs Singapore* Dr. Mohammad Maliki bin Osman dan Wamenhan Thailand Jenderal Chaichan Changmonkol, Kamis (25/1) di Nusa Dua, Bali.

Menhan RI mengatakan, *Soft Launching "Our Eyes"* merupakan wujud konkrit kerja sama enam negara di kawasan dalam rangka perang terhadap terorisme dan radikalisme yang sedang berkembang pesat dan telah menjadi kekhawatiran hampir semua negara di dunia dewasa ini.

Menurut Menhan RI, kecenderungan perkembangan lingkungan strategis di masa kini semakin sulit diprediksi dan penuh ketidakpastian. Ancaman dimasa depan tidak lagi hanya ancaman konvensional atau ancaman konflik antar negara, namun ancaman

realistis dari ideologi tertentu dan kelompok masyarakat lintas negara yang tidak puas dan terpinggirkan menjadi semakin nyata.

*Soft Launching "Our Eyes"* ini juga dapat menjadi barometer awal kerja sama enam negara yang paling terpengaruh terorisme dan radikalisme di kawasan Asia Tenggara. Bahkan bukan tidak mungkin di masa depan, kerja sama "Our Eyes" akan berkembang bukan saja terkait bidang terorisme dan radikalisme tetapi meningkat di bidang kerja sama keamanan lainnya.

"Saat ini baru melibatkan 6 dari 10 negara ASEAN, namun diharapkan di masa depan, forum "Our Eyes" akan berkembang keanggotaannya secara lebih luas di masa mendatang", tambahnya.



Konsep “Our Eyes” merupakan platform kerja sama konkrit yang digagas oleh Menhan RI dan telah didukung secara aklamasi oleh para Menhan ASEAN. Latar belakang gagasan atau inisiatif kerja sama “Our Eyes” ini dipengaruhi oleh adanya ancaman terorisme dan radikalisme di kawasan Asia Tenggara. Mengingat masing – masing negara memiliki cara yang berbeda dalam menanggulangi ancaman tersebut, maka dibutuhkan sinergitas dan koordinasi dalam rangka mendapatkan informasi yang strategis.

Dengan adanya kerja sama “Our Eyes” ini, maka negara – negara ASEAN diharapkan akan dapat lebih cepat, tepat, akurat dan kekinian dalam menanggulangi ancaman radikalisme, ekstrimisme dan terorisme sehingga dapat meminimalisir jatuhnya korban.

Dalam mekanisme konsep “Our Eyes” ini, negara – negara peserta dapat saling bertukar informasi

strategis yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan operasi melawan terorisme. Pembaharuan informasi strategis terkini terkait dengan terorisme dan radikalisme tersebut, nantinya akan sangat membantu dalam mempertajam asumsi atau prediksi situasi, serta mendukung dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam upaya penanggulangan terorisme dan radikalisme.

Sebelum acara *Soft Launching* ini, mekanisme terkait konsep kerja sama “Our Eyes” tersebut telah dibahas bersama oleh enam negara melalui pertemuan *Joint Working Group* pada tanggal 30 November 2017 di Jakarta dan 24 Januari 2018 di Bali. \*\*\*





## LAWATAN MENHAN AS KE INDONESIA MEMBAWA AGENDA PERKUAT KERJASAMA PERTAHANAN



Sejak hubungan diplomatik secara resmi terjalin pada tahun 1949, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengalami dinamika hubungan kerjasama bilateral bidang pertahanan. Pada tahun 2005, Indonesia dan Amerika Serikat melakukan normalisasi hubungan yang berimplikasi pada peningkatan berbagai kerjasama, diantaranya pendidikan militer, kontraterorisme, kebencanaan, dan sebagainya.

Hubungan kedua negara semakin menunjukkan peningkatan dengan disepakatinya US-Indonesia *Comprehensive Partnership Agreement* (Kerjasama Ekonomi Indonesia-Amerika) pada tahun 2010. Kerjasama ini lebih erat dibandingkan kerjasama bilateral pada umumnya dan mengacu pada tiga pilar, yaitu a) politik dan keamanan; b) ekonomi dan pembangunan; c) sosial,

teknologi dan lingkungan. Pada proses pengimplementasian pilar politik dan keamanan, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki *Defense Framework Arrangement for Security* yang fokus penanganan bidang pertahanan dan keamanan serta mengintegrasikan berbagai kerjasama yang telah terbentuk selama ini.

Khusus hubungan bidang pertahanan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika telah memberikan pernyataan bersama tentang komitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang pertahanan. Pernyataan bersama kedua Pemerintahan ini disampaikan saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Washington 26 Oktober 2015 bertemu dengan Presiden Barack Obama. Pada hari yang sama Pernyataan Bersama Kerjasama Komprehensif Bidang Pertahananpun (*Joint Statement for*

*Comprehensive Defense Cooperation*) ditanda tangani oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Ash Carter dan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu. Selain itu Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Donald Trump di sela-sela pertemuan KTT G-20 yang diadakan di Jerman pada bulan Juli tahun 2017 lalu juga telah sepakat untuk peningkatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat perlu diteruskan.

Guna meningkatkan kemitraan strategis Pemerintah RI dan Amerika Serikat, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, James Norman Mattis mengadakan lawatan beberapa hari ke Indonesia. Mengawali lawatannya di Indonesia, Menteri Pertahanan Amerika, James Norman Mattis berkunjung ke Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, pada Senin 22 Januari 2018, di Kantor Kementerian Luar



Negeri, Jakarta. Salah satu agenda strategis yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut adalah masalah arsitektur Regional Indo-Pasific.

Menlu RI, Retno LP Marsudi mengatakan konsep Regional Indo-Pasific hendaknya dibentuk atas keterbukaan, semangat kerjasama dan mengedepankan kebiasaan berdialog. Menurut Menlu RI Retno, jika ketiga hal ini diterapkan maka dipercaya akan membawa perdamaian, stabilitas, hingga kesejahteraan di kawasan. Untuk itu pihak Indonesia akan terbuka lebar kepada pihak manapun, termasuk Amerika Serikat untuk mengadakan pembicaraan pengembangan Indo-Pasific.

Usai bertemu dengan Menlu RI, Menhan Amerika Serikat, yang juga seorang purnawirawan Angkatan Bersenjata Amerika melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu. Kedatangan Menhan AS tersebut

disambut dengan Upacara Jajar Kehormatan. Tujuan kunjungan Menhan AS untuk mempererat hubungan bilateral pertahanan kedua negara yang berlandaskan prinsip-prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan. Amerika adalah sahabat dekat dan merupakan negara yang penting di kawasan serta sudah sejak lama saling membangun kerjasama dengan Indonesia di bidang Pertahanan.

Dalam pertemuan tersebut kedua Menteri Pertahanan membahas berbagai hal, antara lain, visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, kerja sama bilateral dan multilateral di kawasan dalam Patroli Terkoordinasi Trilateral, dan kerja sama "Our Eyes". Pertemuan juga membahas keamanan informasi militer atau *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) dan pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista), serta kebijakan maritim.

Menhan RI meyakini hubungan yang baik ini akan terus ditingkatkan melalui komunikasi dan dengan adanya saling interaksi antara kedua negara. Selain itu dengan adanya pertemuan yang ketiga kali ini, ikatan kerjasama antara kedua negara akan semakin erat sehingga dapat membuka peluang-peluang baru guna peningkatan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi.

Lebih lanjut Menhan Ryamizard Ryacudu berharap, hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat di bidang pertahanan akan dapat memberikan sumbangan yang positif, tidak saja bagi kepentingan nasional kedua negara, tetapi juga bagi terpeliharanya keamanan, perdamaian dan stabilitas kawasan serta tentu saja kesejahteraan masyarakat.\*\*\*



## MENHAN RI – AUSTRALIA TANDATANGANI PERPANJANG KERJA SAMA YANG HABIS MASA BERLAKUNYA



Sebelum menghadiri “Sub-Regional Defence Ministers’ Meeting on Counter Terrorism”, di Perth, Australia, Menhan RI Ryamizard Ryacudu dan Menhan Australia Marise Payne menandatangani perpanjangan perjanjian kerja sama Indonesia – Australia (*Defence Cooperation Arrangement/DCA*), Kamis (1/2).

Perjanjian kerja sama ini, sebelumnya telah ditandatangani kedua negara pada tanggal 5 September 2012 dan pada tanggal 5 September 2017 DCA tersebut telah habis masa berlakunya. Dalam perjanjian ini, kedua negara menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerja sama di bidang pertahanan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, saling menghormati dan saling percaya.

Pada saat pertemuan bilateral dibahas beberapa isu diantaranya kerja sama di kawasan dalam Patroli Terkoordinasi Trilateral dan kerja sama “Our Eyes”. Selain itu, juga dibahas isu mengenai Korea Utara, perkembangan Laut China Selatan, serta *returned foreign terrorist fighter* atau kembalinya pejuang teroris asing yang berperang untuk ISIS serta perkembangan krisis di Rohingnya.

Mengenai pengungsi Rohingnya di Myanmar, Menhan RI melihat krisis Rohingnya ini merupakan permasalahan di kawasan yang harus ditangani secara manusiawi dan proporsional. Jika tidak maka akan berpotensi menjadi ancaman yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok ISIS. Indonesia mengajak para negara sahabat untuk bekerjasama memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingnya.

Melalui pertemuan ini, Menhan RI berharap kedua pihak dapat saling memberikan masukan bagi peningkatan kerja sama pertahanan dalam mendukung kepentingan nasional kedua negara. Selain itu diharapkan pertemuan ini akan menjadi awal yang baik dan bermanfaat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan kedua negara.

### Forum Menhan ASEAN – Australia Bahas Proyeksi Tantangan Keamanan dan Pertahanan

Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan dari enam negara anggota ASEAN yang tergabung dalam Forum “Our Eyes”, bertemu dalam Forum Regional Menteri Pertahanan, di Perth Australia, Jumat (2/2). Forum ini membahas proyeksi tantangan keamanan dan pertahanan di masa mendatang



dengan melibatkan negara Indonesia, Malaysia, Philipina, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand dan Australia sebagai tuan rumah.

Dalam Forum Regional “*Sub Regional Defence Ministers’ Meeting*” di Perth Menhan RI mengulang kembali komitmen delegasi enam negara yang telah menyetujui untuk dibentuknya “*Our Eyes*”. Walaupun saat ini baru melibatkan enam dari sepuluh negara ASEAN, namun diharapkan, di masa depan, forum “*Our Eyes*” akan berkembang keanggotaannya secara lebih luas.

Kedepannya kerjasama antara keenam negara ini akan diperluas dengan mengajak empat negara anggota ASEAN lainnya yaitu Laos, Kamboja, Myanmar dan Vietnam untuk turut bergabung dalam mekanisme pertukaran informasi strategis ini. Konsep ini adalah murni kerjasama untuk mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme di kawasan tanpa adanya agenda politik di dalamnya.

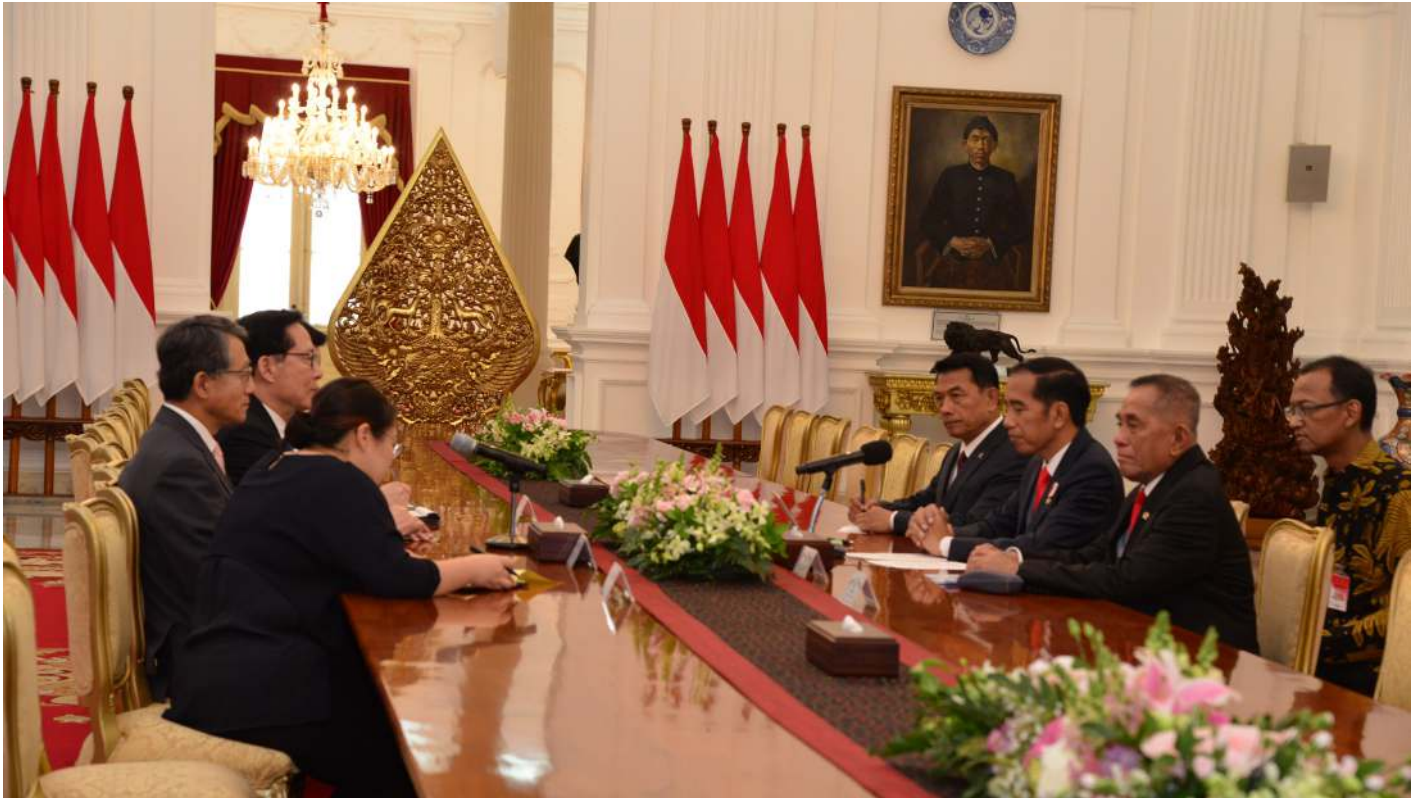
Menhan RI menyampaikan dalam kaitannya dengan forum “*Our Eyes*” yang baru diresmikan pada tanggal 25 Januari 2018 lalu di Bali, bahwa dalam waktu dekat akan dibentuk *Working Group*. *Working Group* ini terdiri dari empat atau lima orang dari masing-masing negara untuk bertemu secara periodik dan melangsungkan pertukaran informasi strategis terkait terorisme dan radikalisme.

Apabila suatu saat, diperoleh hasil *assessment* yang sangat mengkhawatirkan, *Working Group* dapat melapor kepada Menteri Pertahanan masing-masing terkait situasi yang berkembang. Dari informasi strategis yang didapat, para Menhan dapat membuat kebijaksanaan dan saran yang lebih tepat kepada kepala negara, terkait upaya pemberantasan terorisme dan radikalisme.\*\*\*





## KOREA SELATAN TINGKATKAN KERJASAMA DENGAN RI MENJADI KEMITRAAN KHUSUS



Didahului oleh upacara resmi jajar kehormatan, kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Korea Selatan (Korsel) Y.M. Song Young-Moo diterima Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu di Kantor Kemhan Jakarta, Selasa (30/1). Kunjungan Menhan Korsel yang telah kali ketiganya ini adalah untuk menindaklanjuti pertemuan kedua kepala negara yaitu Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Korea Moon Jae-in pada pertemuan di Bogor, Desember tahun lalu.

Melalui Menhan Korsel, Presiden Korea secara khusus menyampaikan untuk meningkatkan kerjasama atau kemitraan kedua negara dari *Strategic Partnership* menjadi *Special Strategic Partnership* atau kemitraan khusus. Untuk itu dalam kesempatan kunjungannya ke Kemhan kali ini, pihak Korea menyampaikan

keinginannya untuk bertukar informasi terkait perkembangan kerjasama kedua negara yang telah dibangun selama ini.

Dengan melihat arah kebijakan yang sama dengan Indonesia, maka Pemerintah Korea melihat Indonesia memiliki potensi untuk memproduksi sendiri industri pertahanan khususnya dalam produksi dan pembangunan kapal selam.

Menanggapi hal tersebut, Menhan Ryamzard Ryacudu menyampaikan beberapa masalah yang perlu menjadi perhatian Indonesia dan Korea diantaranya isu terkait Korea Utara, Laut China Selatan, Laut Sulu di Philipina dan pengungsi Rohingnya. Menurut Menhan RI, jika pengungsi Rohingnya tidak ditangani secara benar maka

teroris dapat memanfaatkannya sebagai bagian dari teroris. Hal ini harus menjadi perhatian bersama mengingat terorisme merupakan ancaman dan musuh bersama.

Setelah melakukan pertemuan dengan Menhan RI di Kemhan, Menhan Korea langsung bertolak ke PT PAL Surabaya untuk melihat kegiatan *Joint Section* kapal selam ke-3 dan melihat secara langsung pengoperasian KRI Nagapasa-403. Lawatannya Menhan Korea tersebut diakhiri dengan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Rabu (31/1) di Istana Bogor. \*\*\*



## AWAL TAHUN 2018, KEMHAN TERIMA PESAWAT CN 235 DAN HELI DARI PT DI

Membuka tahun 2018, Kementerian Pertahanan menerima Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) berupa 3 (tiga) unit Heli Serang, 1 (satu) unit Pesawat Udara CN 235-220 *Maritime Patrol Aircraft* (MPA) dan 2 (dua) unit Heli Anti Kapal Selam (AKS) dari PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Penyerahan berlangsung hari Selasa (9/1) di Hanggar *Fixed Wing* PT DI, Bandung Jawa Barat, dilakukan secara simbolis dari PT DI kepada Kemhan.

Serah terima dilaksanakan melalui penandatanganan berita acara oleh Direktur PT DI, Elfien Goentoro dan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabarahan) Kemhan Laksda TNI Agus Setiadji dengan disaksikan Menhan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, Kasad Jenderal TNI Mulyono dan pejabat terkait di lingkungan BUMN.

Pada kesempatan tersebut, Menhan mengatakan bahwa Indonesia diprediksi akan menjadi raksasa ekonomi baru di dunia beberapa tahun yang akan datang. Kondisi ini akan mendorong industri pertahanan dalam negeri yang mandiri. Untuk itu diperlukan komitmen bersama dalam membangun industri pertahanan menuju kemandirian yang pada gilirannya akan mendorong perekonomian Indonesia.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan bahwa penyerahan sejumlah alutsista yang berlangsung di PT DI ini, merupakan wujud dari capaian

yang ditunjukan industri dalam negeri Indonesia dalam menjawab tantangan tersebut. Selain itu juga menjawab tantangan industri masa kini yang begitu pesat dan sarat dengan kompetisi global antar bangsa.

Menhan mengungkapkan bahwa kita telah mampu berdiri di atas kaki sendiri dan dalam proses menuju visi menjadi produsen alutsista yang mampu berkiprah di kancah internasional. Oleh karena itu Menhan mengajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa produk heli dan pesawat udara ini memiliki kualitas dan kemampuan yang handal serta prima dalam memperkuat sistem pertahanan negara Indonesia.





Sementara itu, Dirut PT DI mengatakan bahwa pesawat CN 235-220 MPA dan Helikopter AS565 *Mbe Panther* AKS akan memperkuat TNI AL. Sedangkan Helikopter Serang AS555AP *Fennec* akan memperkuat TNI AD. Pesawat CN 235-220 MPA dapat digunakan untuk berbagai macam misi seperti patroli perbatasan

dan Zona Ekonomi Eksklusif, pengawasan pencurian ikan dan pencemaran laut, pengawasan imigrasi dan perdagangan manusia, penyelundupan narkoba dan barang ilegal serta pencarian dan penyelamatan korban bencana.

Pesawat CN235-220 MPA adalah produksi anak negeri yang

sudah banyak dibeli oleh negara-negara sahabat untuk keperluan patroli laut, sedangkan Helikopter Serang AS555AP *Fennec* serta Helikopter AS565 *Mbe Panther* adalah hasil kerjasama PT DI dengan *Airbus Helicopters* Perancis. Namun untuk fase integrasi AKS sejak design hingga pemasangan adalah hasil karya PT DI. \*\*\*





# Scot Launching Our Eyes Initiative

January 25<sup>th</sup> 2018 Nusa Dua, Bali - Indonesia







# WIRA

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

## THE NATIONAL DEFENSE POLICY 2018

EDITION OF JANUARY-FEBRUARY 2018 - VOLUME 70 / NUMBER 54

THE IMPLEMENTATION OF  
CHANGE MANAGEMENT  
THROUGH THE ROLE OF  
INFORMATION AND  
DOCUMENTATION  
MANAGEMENT OFFICER (PPID)  
IN MANAGING INFORMATION  
TECHNOLOGY

THE USE OF ALTERNATIVE  
ENERGY  
FOR THE INDONESIAN  
NATIONAL ENERGY  
SECURITY

THE MINISTRY OF DEFENSE  
HIGH LEVEL OFFICIALS  
MEETING 2018

ISBN 1693-0231



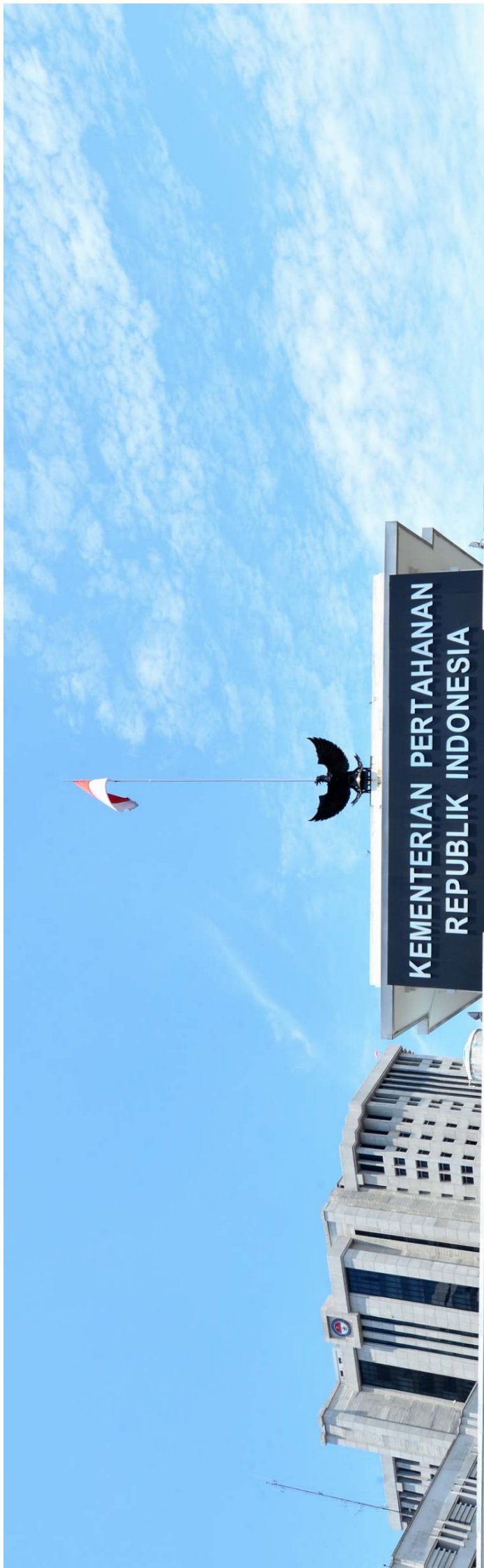
ENGLISH

 [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id)

 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia  
 kemhan

 Kemhan\_RI  
 kemhanri





# **RAPAT PIMPINAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI TA. 2018 11 Januari 2018**







## EDITORIAL BOARD

### Advisors:

Minister of Defense  
General (Ret.) Ryamizard Ryacudu

Secretary General of MoD  
Air Vice Marshal Hadiyan Sumintaatmadja

### Editor in Chief:

Head of Public Communication Center of MoD  
Brig. Gen. Totok Sugiharto, S.Sos

### Managing Editor:

Chief of Information Cooperation of Public  
Communication Center  
Col. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

### Editors:

M. Adi Wibowo, M.Si  
1<sup>st</sup> Lt. Lindu Baliyanto.

### Graphic Designer:

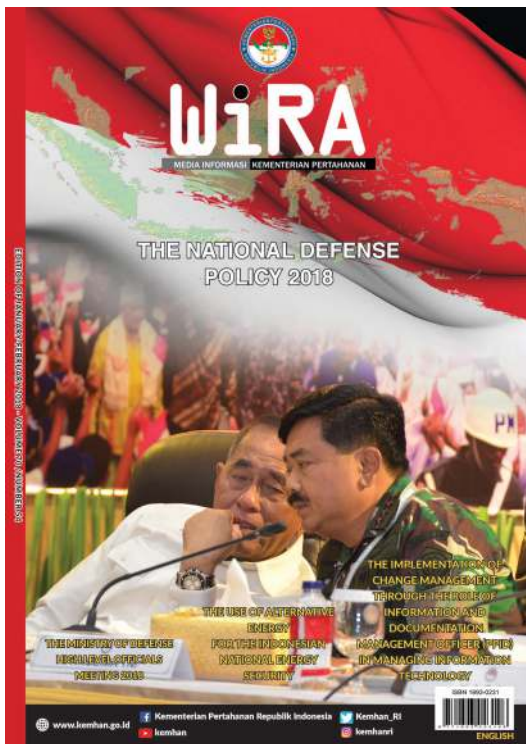
Imam Rosyadi  
Mandiri Triyadi

### Photo:

Photografers of Public Communication Center of  
MoD

### Circulation Staff:

Nadia Maretti, M.M.



Published by:  
Public Communication Center of MoD,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta  
Telp. 021-3829151





## ***Editorial***

Dear kind readers,

We warmly greet you through this first edition of WIRA in 2018.

Wira edition of January-February 2018 brings materials related to the National Defence Policy among others The Ministry of Defense High Level Officials Meeting 2018; The National Defense Policy 2018; The Use of Alternative Energy for the Indonesian National Energy Security; The Implementation of Change Management through the Role of Information and Documentation Management Officer (PPID) in Managing Information Technology.

To enrich articles of this WIRA magazine, we continuously expect your participation to send articles, opinions, information, responses, or critics and recommendations through email [redaksi.wira@kemhan.go.id](mailto:redaksi.wira@kemhan.go.id). WIRA magazine can also be accessed online in [www.kemhan.go.id](http://www.kemhan.go.id).





# Contents

## MAIN REPORT

6

### THE MINISTRY OF DEFENSE HIGH LEVEL OFFICIALS MEETING 2018



Starting 2018 the Ministry of Defense held the High Level Officials Meeting at the Ministry of Defense Office, Jakarta. The Ministry of Defense Executive Meeting 2018 is a strategic step in evaluating the implementation of the working program for the Financial Year 2017, and review the prospects of successful working program for the Financial Year 2018.

## ARTICLE

16

### THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY FOR THE INDONESIAN NATIONAL ENERGY SECURITY

Oil reserves in Asia have continued to decline over the past twenty years, the largest oil and gas reserves dominated by the Middle East, Russia, the Americas and Africa.

## MAIN REPORT

10

### THE NATIONAL DEFENSE POLICY 2018



The development of state defense refers to a system of management that is carried out comprehensively, so that a policy is needed on various related aspects. The country's defense policy is flexible and adaptive embodied through policy directions and objectives.

## ARTICLE

21

### THE IMPLEMENTATION OF CHANGE MANAGEMENT THROUGH THE ROLE OF INFORMATION AND DOCUMENTATION MANAGEMENT OFFICER (PPID) IN MANAGING INFORMATION TECHNOLOGY

Change Management is a relatively new concept that moves to transform organizations through, restructuring, reengineering, re-strategizing, acquisitions, employee reductions, quality programs, as well as cultural reform.

## THE MINISTRY OF DEFENSE HIGH LEVEL OFFICIALS MEETING 2018

By:  
Editorial team

*"Strengthening Institutional Synergy in Supporting a Strong Defense Posture Through TNI Professionalism, Defense Industry Development, and the Power of the People Having the Spirit of State Defense".*



Starting 2018 the Ministry of Defense held the High Level Officials Meeting at the Ministry of Defense Office, Jakarta. The Ministry of Defense Executive Meeting 2018 is a strategic step in evaluating the implementation of the working program for the Financial Year 2017, and review the prospects of successful working program for the Financial Year 2018. The Ministry of Defense Executive Meeting 2018, which was held for 2 days dated 10 to 11 January 2018, brought up the theme "Strengthening Institutional Synergies

in Supporting a Strong Defense Posture Through TNI Professionalism, Defense Industry Development, and the Power of the People Having the Spirit of State Defense".

The first day of the Ministry of Defense High Level Officials Meeting discussed the reflection of Ministry of Defense Working Program of 2017 and the projection of Ministry of Defense Working Program of 2018 as well as Ministry of Defense internal activities. Whilst the second day carried out the

presentation of the State Defense Policy of 2018 and the approval of the Budgetary Order year 2018 by the Minister of Defense to the TNI Commander in Chief, Chiefs of Staffs and Secretary General of Ministry of Defense. In addition, on this second day the participants of Executive Meeting received briefings from several state officials, one of them was the Minister of Home Affairs, Tjahjo Kumolo, who conveyed the formulation of national policy on spatial management in order to support the state defense





system. There was also a briefing on the required policy to meet the needs of defense equipment in line with the provisions of national and international trade laws submitted by the Minister of Trade, Enggartiasto Lukita. Moreover, the Chairman of BPK, Moermahadi Soerja Djanegara described on the formulation of policy on the state finance management within Ministry of Defense and TNI. The other attending speaker, Prof. Dr.Moh Mahfud MD., SH, had the opportunity to provide an explanation on the institutions of Ministry of Defense and TNI in relate to other institutions in realizing a formidable state defense.

Upon opening Ministry of Defense High Level Officials Meeting on the second day, Thursday, January 11, 2018, the Minister of Defense Ryamizard Ryacudu, expressed the national security situation in Indonesia is very influential for the strategic interests of other countries. Therefore, the Minister of Defense suggested the Indonesian State Defense Architecture Development directive to realize national security stability, which is conducive to regional and global security. The development of the State Defense Architecture is conducted through Smart Power

defense strategy approach, which is a synergistic combination between the development of Hard and Soft Power based on the conscience. In order to realize the directive, besides requiring from the support of professional, strong and having a state defense understanding Human Resources, Indonesia also needs to be supported with reliable and adequate defense tools and infrastructure.

The Minister of Defense also added that the efforts to realize the stability of strategic environmental security, is also an integral part of Indonesia's national interests. Therefore, Indonesia needs to look at the development of a situation threatening the world peace and stability in order to take concrete and constructive steps.

On the occasion of Ministry of Defense High Level Officials Meeting 2018, the Minister of Defense also talked about the Public Policy of any State Organizer directed towards the realization of security and welfare for the people. In this case, it means that the management of capacity building and the defense force of the nation is directed to be in favor to the people's welfare.

The Minister of Defense mentioned that if the welfare of the community is improved, it will lead to increased national security. On the contrary, if the national security increases then the community will be more focused to realize the welfare. This phenomenon is considered by the Minister of Defense as two sides of the coin. If one side does not exist, then the money does not have a real value.

Furthermore, the Minister of Defense said, Indonesia is projected to be the new world economic giant along with several other countries in the next few years. The projection comes from the research conducted by several world institutions, such as Standard Chartered Research, International Monetary Fund (IMF) and City Investment Research and Analysis.

Based on the results of research describing the condition of Indonesia is driven one of them by the increasing ability of the independent defense industry in the country. The strength of the defense industry owned by a country will reflect the economic strength of the country itself. As well as some of the world's advanced economies today, such as the United States, Britain, Russia and France, which are sustained by the sophisticated defense industry.

Minister of Defense believes that the development of defense industry being promoted by the Government in turn can increase the capability and strength of the state defense, and encourage the growth of economic independence towards prosperous Indonesian society. In other words, along with the progress of the Indonesian Defense Industry, it will also encourage growth and economic independence in the country in line with the vision of the President of



the Republic of Indonesia Nine-Point Priorities (Nawa Cita). Moreover, with the potential of natural resources and large human resources, Indonesia has abundant modalities and capabilities in realizing the independence of the defense industry. However, it still needs to be supported by efforts and mutual commitment among the parties concerned to work together to build the defense industry toward independence.

Minister of Defense invites all stake holders to show and convince the world that the main weapon system products made in Indonesia used by the TNI have a reliable and excellent quality and ability. In this case, it can be proven in strengthening the Indonesian National Defense system. The world will eventually see the capability of the Indonesian main weapon system products, then it is expected there will be procurement of main weapon system from Indonesia.

Minister of Defense Ryamizard Ryacudu before the High Level Officials Meeting participants, also

emphasized some important points; first TNI Officers must be professional in their fields and focus on the main tasks given. In addition, all TNI officers must not carry out their tasks freely. If this happens, it will harm the TNI organization.

Second, loyalty is the soul of TNI Soldiers, in which it becomes the core of TNI's strength and solidity. Third, leaders should become the solution of every problem. Leaders must always put forward their conscience as the basis of their behavior and attitude. Since leaders who have pure conscience will not easily give up and have wisdom. In addition, leaders are expected to always be aware of their existence, not just think about their own interest, and can be beneficial to every one especially for their environment and nation. Fourth, the Five Principles (*Pancasila*), Seven Oaths (*Sapta Marga*), Soldiers Creed (*Sumpah Prajurit*) and Eight Obligatory 56 are important to be followed as well as laws and regulations that act as spirit and guidance in living the life of soldier. Besides, it makes the values contained

in the guidelines as the foundation of a solid and professional TNI Organization culture.

### Seeking New Breakthroughs in the Implementation of Defense Tasks

Meanwhile, on the first day of Ministry of Defense High Level Officials Meeting 2018, the Secretary General of Ministry of Defense, Air Vice Marshal Hadiyan Sumintaatmadja said the current development of strategic and national environments is so dynamic that the country's defense policy should always be examined. According to the Secretary General of Ministry of Defense, new breakthroughs related to the implementation of state defense tasks need to be continuously developed. Beside new breakthrough, there is a need for anticipatory attitude, responsiveness and awareness to the dynamics of the Ministry of Defense's main tasks.

Faced with such dynamics, the task of the Ministry of Defense in the future is also increasingly complex. This task requires support and coordination







as well as synergy of various national components and the relevant Ministries/Agencies. In line with this, the Ministry of Defense through its policy and working program, strive to continue to create a strong national defense system. Besides, it must also ensure the policies and work programs are constantly updated and tailored to the development of strategic environment as well as threat analysis.

In the Ministry of Defense High Level Officials Meeting 2018 Forum, the Secretary General of Ministry of Defense also outlined some achievements by the Ministry of Defense programs which have been implemented, such as: Building a Professional TNI Program; with the fulfillment of Minimum Essential Force (MEF) according to Strategic Plan. TNI has also been equipped with various types of new weapon system for all services and has built houses for soldiers.

Border Security Program; The Ministry of Defense has built inspection roads and border patrol in Kalimantan,

Border Security Posts in Kalimantan, Papua and NTT as well as building logistics lines in Papua and NTT.

World Peace Participation Realization Program; The sending of UN Peacekeeping Troops continues to be held annually. Furthermore, in various bilateral and multilateral defense cooperation forums, the Ministry of Defense continues to voice important regional security issues that must be anticipated together, including initiating defense cooperation in areas such as the Indomalphi Sea Patrol and

the Trilateral Air Patrol. Developing Strong, Independent and Competitive National Defense Industry Program; the Ministry of Defense continues to empower the defense industry and the program has increased over the previous year.

The Development of State Defense Awareness Program (PKBN); This program is followed with the formation of state defense cadres in all parts of Indonesia. The enthusiasm of the citizens in the state defense activities is very high and it is a challenge for the Ministry of Defense to improve the support of the state defense program.

The Ministry of Defense High Level Officials Meeting Forum 2018 was attended by the TNI Commander in Chief, Chief of Staffs of Services, Secretary General of Minister of Defense, Inspector General Minister of Defense, Echelon I and II officials within Ministry of Defense and a number of officials from TNI Headquarters, Service Headquarters and Defense Industry Policy Committee (KKIP). There were representatives from related Ministries/Institutions as well.\*\*\*



# THE NATIONAL DEFENSE POLICY 2018

## 1. General.

The National defense policy is organized to manage all national resources and infrastructures to achieve state defense objectives in order to support national development. The development of state defense refers to a system of management that is carried out comprehensively, so that a policy is needed on various related aspects. The country's defense policy is flexible and adaptive embodied through policy directions and objectives.

## 2. Policy Direction.



- a. Continuing the development of a Consistent national defense against Pancasila, the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia and the Unitary State of the Republic of Indonesia as well as Bhineka Tunggal Ika following the political policies of the state in the form of legislation with the principles of democracy, civil supremacy, human rights, and international laws that have been ratified.

- b. Guided by the Government's vision, mission and priority programs, including the world's maritime axis policy and regional development, supported by the use of satellite technology and drone systems; General Policies and Policies on the Implementation of National Defense and the National Defense Strategic Plan of 2015-2019.

- c. Continuing the development of the Military Defense Posture directed at the development of TNI's Minimum Strength (MEF) to the TNI's Basic Principles, guided by the concept of developing TNI's ideal posture that has been planned in the long term by referring to modernization of armaments, the implementation of maintenance treatment, organizational development and fulfillment of facilities infrastructure supported by the defense industry's capability and professionalism, as well as improving the welfare of soldiers.

- d. Establish cooperation with friendly countries in the framework of capacity building and enhance active participation in Peacekeeping Operations (PKOs) and establish regulation of mobilization of TNI forces in the task of world peace under the United Nations in the framework of defense diplomacy.

- e. Creating a strong, independent, and competitive defence industry through enhancing the role of KKIP (Defense Industry Policy Committee) in formulating national defense industry policy.
- f. Support the development of the nation's character through building the awareness and the ability of defend state in order to develop the values in the state defense as well as supporting the national development.

## 3. Policy Goals.

- a. Established human, natural and artificial resources, as well as national infrastructures potentials, as a defense potential to



support the power of state defense through many the development of Pancasila ideology to all levels of society, especially to the younger generation, and our future successors; education and training; research; community service; and cooperation in synergy with





Ministries/

Agencies and local government, as well as other components of the nation, as a form of an early preparation of national defense.

- b. The realization of the management and organization of state defense policy based on research, development and assessment as well as the analysis of strategic environment development, national resources, science and technology, highly dynamic defense tools by considering Defense Area Plan (RWP) and Defense Area Detail Plan (RRWP) according to the policy of world maritime shaft development and various forms of threat to the national defense.
- c. The implementation of the drafting and discussion of the Bill in accordance with the priority of the national legislation program, called: The Bill of State Secrets, the National Resource Management Bill, and the Coding Bill; Revision of the TNI Law; the discussion of the draft of Government Regulation, the Government Regulation, the Presidential Regulation, the Regulation of the Minister of Defense, other implementation provisions, as well as the inclusive cumulative bill regarding to the ratification of international defense agreements, in accordance with the defense legislation program.
- d. The realization of the Ministry of Defence organizational structure and regional and centralized TNI units with regard to the geographical conditions in order to build a constrain in accordance to the concept of national development. Kemhan Organizational arrangement in accordance with the general policy of national defense by taking into account the organizational structure of the gradually and comprehensively establishment of Executorial Representative of Duties of Ministry of Defence in the region according to priority by considering the condition of the region especially in the areas with border and conflict prone areas. The establishment of Indonesia Defense Attache Offices in Nigeria, Fiji, Bangladesh, Afghanistan and Iraq. The mechanism of Defense Attaché function as the TNI's element to implement the policy of defense diplomacy, establish strategic partnership with friendly countries, for the benefit of the Ministry of Defense and TNI at the Representative of the Republic of Indonesia abroad in accordance with the provisions of applicable legislations. The TNI organization arrangements in accordance with TNI development policy; career managment; increasing the professionalism and prosperity of the TNI; the improvement of health services for soldiers and civil servants; legal guidance and public information; as well as the improvement of effective administrative governance in support of the organization.
- e. The realization of development, guidance and strengthening the intelligence among related institutions through the development of national defense information system based on cyber defense; increased professionalism of cyber defense personnel; expansion of the detection and protection areas of the defense sector and other sectors; as well as the enhancement of information operations through social media in the context of the realization of national stability.
- f. The realization of integrated information and communication technology development for the development of information systems and data processing of state defense based on cyber defense by utilizing satellite technology to support the collection, processing, storage and presentation of data and right information, fast, accurate and secure as well as the interoperability needs between forces in command and control system. Conducting evaluation and re-negotiation of procurement of the national communications satellite for military purposes as an attempt to save the Geo 123 BT Satellite Orbit Slot in order to create more accountable and transparent procurement management as needed.
- g. Fulfillment of TNI posture by continuing development of TNI's minimum essential force supported by defense industry capabilities and professionalism, and improving the welfare of soldiers; the enhancement of mobility capability in the form of heavy conveyance and combat power of TNI, also; the preparation of standby forces for handling the natural disasters,





humanitarian assistance, border area security, as well as the duties of the world peace mission and other emergency matters.

- h. The realization of budget and financial management accountability through supervision pattern of pre audit, current audit, post audit by utilizing electronic government technology and the implementation of follow-up of examination result on recommendation of State Audit Agency in order to achieve unqualified opinion assessment through the establishment of Task Force, and improving the implementation of the Internal Control System, strengthening Bureaucracy Reform, and accelerating the realization of the Integrity Zone to the Corruption Free Territory (WBK) and the Clean Bureaucracy Serving Area within Kemhan and TNI.
- i. The implementation of the enhancement of the Development of Border Area Security through the handling of the boundary line and continue the development of the concept of the security belt gradually and integrated way, as well as the realization of the synergy between stakeholders through coordination and cooperation in enhancing the facilities and infrastructure development in the border of Kalimantan, Papua and East Nusa Tenggara. Improved the management of Islands which is strategic with continuing development and development of priority TNI strength in the islands of Natuna, Merauke, Saumlaki / Selaru, Biak and Morotai.
- j. The implementation of protection, supervision and safeguarding of





all strategic national objects from the terrorist threats and other forms of threat that may endanger the continuity of national development.

- k. The implementation of enhanced deployment of sea power with the support of air power in law enforcement efforts, and the enforcement of illegal activities in the marine areas of national jurisdiction, and the implementation of maritime potential empowerment in border areas, remote areas, and Outermost Small Islands in the framework of the existence of state sovereignty.
- l. The implementation of the mobilization of land forces with the support of air power as an effort to increase security in the border areas and the outer islands in the jurisdiction of national territory in order to support the existence of state sovereignty, as well as optimizing the territorial coaching to build resilience of the region supported by one map policy.
- m. The implementation of the mobilization of air power in order to guard and strengthen air patrols, as well as the safeguarding of national airspace in the form of supervision, maintenance and law enforcement in the air of national jurisdiction in order to strengthen the world maritime shaft, encourage Ministries/Agencies to control the acquisition of Flight Information Region (FIR) through technology structuring and mastery; preparation of human resources and infrastructure; as well as the fostering of aerospace potential.
- n. The realization of the enhancement

of the integrated Tri services exhibition in the territory of NKRI through the preparedness and preparedness of the troops, the supervision and security of the territory of national jurisdiction, the optimization of military defense in order to support the continuity of national development, and support the stability of domestic security in the face of the Regional Head Election simultaneously throughout the NKRI.

- o. The realization of international cooperation in the field of defense by adopting an active free foreign policy reflecting the personality of Indonesia as an archipelagic country as well as strengthening identity as a maritime country in

order to strengthen and resolve common security issues while maintaining the principle of enlarging equality and minimizing differences, which is true for the management of regional security for the common good. Strengthening defense diplomacy with friendly countries embodied in the form of Trilateral Indonesia-Malaysia-Philippines security cooperation through coordinated Maritime Patrol activities to prevent and combat piracy and terrorism; Trilateral Air Patrol (TAP) or post command; Army Training and joint military establishment to facilitate coordination, information distribution and intelligence data. Realizing Our Eyes cooperation with ASEAN countries and other



countries, focused on intelligence activities through information exchange. Enhance and strengthen defense cooperation with countries in the South Pacific region to create security stability in the Pacific region. In addition, strengthening regional cooperation with IORA (Indian Ocean Rim Association) or association of countries in the Indian Ocean region to realize maritime security in support of the Government's vision of realizing Indonesia as a World Maritime Axis.

- p. The implementation of professional troop upgrading at the Peace Keeping Mission Center (PMPP) to support the peacekeeping forces in accordance with the country's political policy to increase the deployment of professional TNI troops in strengthening the mission of peacekeeping, supported by adequate equipment and facilities at the request of the UN target which has been specified.

Increased troop contributions to the world's peacekeeping mission to increase international support for the Indonesian government in nominating the UN Security Council's (UNSC) non-permanent members in 2019-2020.

- q. Integrating the development of Defense Industry in regards to the mastery of science and technology and technology transfer through related Ministries/Agencies cooperation within the scope of the Defense Industry Policy Committee (KKIP) to create a strong, independent and competitive defense industry; enhancement of national industrial empowerment supporting the domestic defense industry to produce main and / or supporting components, component and / or supporting industries (supplies), raw materials industry and maintenance of the Main Equipment of Weapon System / Defence Equipment in order to enhance cooperation,

research and product development which supports the national economy. This integration is done through efforts to gradually move the defense industry to Lampung area, which begins with the study and survey location.

- r. The realization of the quality of capable human resources of mastering science and technology, as well as enhancing research and development through the creation and innovation of Defence equipment technology by involving technology users, research and development institutes, universities, and national defense industries. Review and evaluate strategic program priorities to ensure sustainability of programs that can support the defense industry policy and technological development, including the independence of defense satellites; development of KF-X / IF-X fighter jets, submarine development and development, propellant /







ammunition development, national rocket development, national missile development, national radar development, amphibious vehicle development and medium tank development.

- s. The realization of the increase of awareness of the state defense through the State Defense

Awareness Program (PKBN) in order to realize the citizens who love their homeland, have ethics, morals and manners, as well as tough and strong character, which is done in an integrated, and synergize between the Ministry of Defense, Ministries/Agencies, local government, and other components of the nation. State

defense activities are carried out continuously through socialization, education and training in residential, educational and work environments to achieve the target of 8 million cadre of state defenders in order to support the national defense system.\*\*\*



# THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY FOR THE INDONESIAN NATIONAL ENERGY SECURITY

By:

**MUHAMMAD FERRY MUHROM, S.T., M.Si**

Personnel Of The Defense Facilities Agency Ministry Of Defense

Alumni Of University Indonesia



## PRELIMINARY

The existence of natural resources scattered in the territory of Indonesia, is one important thing that underlies the life of Indonesian society. One of its forms is called a fossil energy. Energy derived from fossils that are planted for millions of years in the land of Indonesia is a driving force for the economy of the Indonesian nation. The fossil energy source is a non-renewable resource and one day will be exhausted, so it is necessary to note its availability and existence. Not to mention the process of formation

of fossil energy takes a long time so it is necessary to have a reserve that is alternative energy to replace fossil energy. The main energy source of the world or about  $\pm 80\%$  of the energy needs used today is fossil energy that is petroleum, coal and natural gas. Therefore, the next generation of nations must know how to replace it with renewable energy for the sake of Indonesian people.

The current picture of energy conditions in Indonesia based on demand is still dominated by fossil fuels such as industry,

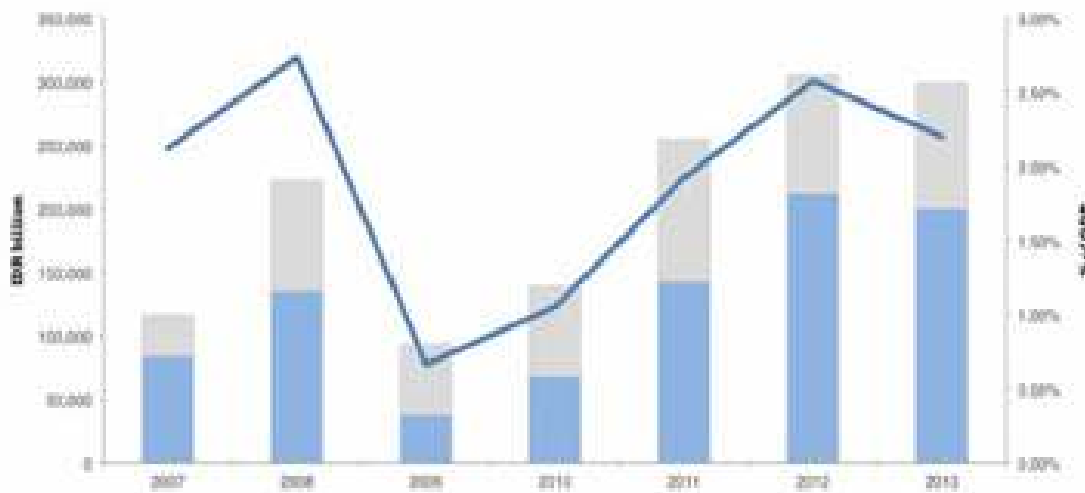
transportation and households that are still dependent on fossil energy. In 2013 fossil energy contributes 94.3 percent of the total energy needs of Petroleum by 49.7 percent, natural gas 20.1 percent and coal 24.5 percent. Out of 49.7 percent of total domestic oil demand, 50 percent must be imported from abroad to meet domestic energy needs in the form of crude oil and petroleum products (*BIN Strategic Analysis Board, 2014: 68*)

Another fact shows that Indonesia is one of the countries in the world that until now still imports





Graph 1.2 Total Fuel Subsidy Expenditure in Absolute Spending  
(Billion Rupiah) and as% of GDP



Source: Fiscal Note and Draft State Budget of Bank of Indonesia

petroleum to meet domestic demand for oil. Fuel Oil (BBM) is a commodity that plays an important role in the economic activities of Indonesia. The oil booming availability occurred during the reign of the new order. The national leaders also want more people to enjoy the abundance of oil. In relate to that, the policy of fuel oil subsidy (BBM) is stipulated. Subsidized fuel causes the price of Fuel Oil (BBM) to be cheaper than its economic price, although the production cost is very high but at that time the Indonesian Government is still financially capable. This phenomenon continues until the oil deficit approaches.

The fuel oil (BBM) price hike in the country so far has been covered with the government subsidy; consequently the burden of State Budget (Revenue and Expenditure Budget) continues to grow. By 2014 the fuel subsidy burden was 199.9 trillion rupiah of the budget devoted to energy subsidies, which was equivalent to about 2.5% of GDP and 25% of the total budget (GSI 2014: Issue 1).

The issue of rising fuel prices is often a political issue. The shock is predicted to happen considering the vital role of fuel in fulfilling the needs of everyday life. As it has been the case before, the consequences of a fuel hike trigger inflation against all basic staples and ultimately harm the people. The influences of petroleum energy on people's activities are: (1) As input of fertilizer factory, (2) Influence on farmers, (3) Influence on transportation and communication (Usman, 2013:1).

### Potential of Indonesia National Alternative Energy

From the problems above we can assume that the development of renewable and non-renewable energy sources is important for research. Alternative energy can be utilized as a substitute for fossil energy in Indonesia. This fossil energy is increasingly limited to both its quantity and reserves. This will be a problem in the future, because the replacement energy from fossil energy, which is much expected to be an alternative energy in 2025,

is not yet able to meet national energy needs in the future. Because of the strategic role of the energy, so that a country having a lot of energy reserves will dominate the world. Therefore Indonesia should not remain silent in the provision of energy needs in country and seek alternative energy sources for the prosperity of the nation and the State in accordance with the mandate of 1945 Constitution.

In terms of energy mix, big challenges arise from high dependence on fossil fuels (especially petroleum). This means that the share of renewable energy utilization is still low and reliance on fossil fuels could raise questions on the sustainability (Planning, 2014: 2nd edition).

Oil reserves in Asia have continued to decline over the past twenty years, the largest oil and gas reserves dominated by the Middle East, Russia, the Americas and Africa. Indonesia's oil reserves according to the Directorate General of oil and gas continue to decline from 2000 to 2012 so



that in 2012 recorded 7.92 MBSD. Based on this fact, Indonesia needs to conduct research on alternative energy security strategies, if the oil and gas reserves begin to decline until it runs out.

How are other countries performing their energy sustainability? For example Malaysia, its national energy policy has three objectives: Supply, Usage and Environment. The Malaysian government provides fiscal incentive for investors engaged in renewable energy, tax exemption 70% of income tax or granting investment for tax allowance of 60% of capital expenditures for 5 years. When Germany entered the year 2000, the role of renewable energy doubled over the next 10 years, the allocation of research budgets for renewable energy increased, the support of political parties was high enough in Germany for the policy of finding alternative energy, and Biofuel (Biotanol) became the main choice, (Noor Aisyah Kotamoralos, LIPI, 2008).

As for Indonesia itself, in fact it has a source of Renewable Energy (EBT) scattered in archipelago. This new renewable energy is not only related to the amount and capacity, but also with its diversity. Many alternative energy sources in Indonesia such as solar energy, geothermal energy, hydro energy, biomass energy, ocean energy (waves), wind energy and uranium can be used as primary energy source for energy substitute of petroleum (fossil). It is very potential to be utilized optimally in the future.

These energies have the potential as an alternative source of much energy with a large number of quantity and spread throughout the territory of the Republic of Indonesia. The government seeks to diversify the supply and utilization of various energy sources in order to optimize the provision of alternative energy in Indonesia. It is necessary to diversify the use of energy from non-renewable energy resources to renewable energy resources.

Alternative energy has been applied in Indonesia in small scale in order to meet the national energy needs such as geothermal power plants operating in several regions in Indonesia such as Komajang PLTP in West Java, Sibayak PLTP in Sinabung North Sumatra and Lahendong PLTP North Sulawesi. The current domestic fuel shortages are a great time to organize and seriously apply these potentials. Although it is very difficult to make a total substitution of fossil fuels today, the implementation of alternative energy sources is very important to begin at the moment.

### Indonesia Energy Security Concept

The energy policy of one country is different from one another, mostly all countries in the world especially developing countries. The policy of promoting economic growth without considering the national energy availability will cause problems. The development of new environmentally friendly renewable energy becomes an

Table 2.1 Alternative energy sources

| No | Tipe            | Sumber Daya                   | Kapasitas Terpasang (MW) | Ratio (persen) |
|----|-----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1  | 2               | 3                             | 4                        | 5 = 4/3        |
| 1. | Hidro           | 75.000 MW                     | 5.940,00                 | 7,92           |
| 2. | Panas Bumi      | 29.164 MW                     | 1.341,00                 | 4,60           |
| 3. | Biomassa        | 49.810 MW                     | 1.644,10                 | 3,30           |
| 4. | Energi Matahari | 4,80 kWh/m <sup>2</sup> /hari | 22,45                    | -              |
| 5. | Energi Angin    | 3 – 6 m/s                     | 1,87                     | -              |
| 6. | Laut            | 49 GW <sup>2)</sup>           | 0,01 <sup>1)</sup>       | 0              |
| 7. | Uranium         | 3.000 MW                      | 30,00 <sup>1)</sup>      | 0              |

Source: National Energy Council 2013





Figure 2.1 National Energy Security Aspect



(Source: BIN 2014 Strategic Analysis Board)

alternative solution to the national energy problem (Yusgiantoro, 2009).

The United States of America in 1973 and the Western European Countries introduced the concept of energy security. When there was an oil embargo by the Middle East Countries (Arab) as the world's major oil producer, energy security has become an increasingly concerning and growing issue ever since, especially in order to build the resilience of domestic energy (BIN Strategic Analysis Board, 2014: 8).

The BIN Strategic Analysis Board (2014:10) stated that there are two concepts of energy security, those are 5S and 4A. Indonesia's energy security embraces 4A main rules; Availability, Accessibility, Cost, Acceptability, which is adapted to the conditions and national capabilities. Energy security is a condition of ensuring the availability of energy, public access

to energy at an affordable price in the long term by keeping an eye on the environmental aspects.

Indonesia implemented fuel subsidies since the 1950's. This subsidy policy is still acceptable as long as domestic fuel needs are still below the amount of petroleum production under the Government right. With this measure, Indonesia has been a net oil importer since 1997. Therefore, policies that focus on fuel subsidies should be reviewed, and put alternative energy as national energy in the framework of strengthening Indonesia's energy security.

The energy security system is very important for a country like Indonesia, in addition to being able to respond to the dynamics of global energy change (external) as well as being independence, to ensure the availability of energy (internal). The Energy Resilience System refers to the Energy Development Policy

as per the Energy Act No. 30 Year 2007, and energy has a role for the improvement of the National Economic and Resilience Activities.

### National Alternative Energy Policy

The regulations discussing the renewable energy in Indonesia has been established through the tools of government policy. These policies encourage the use of new alternative energy by suppressing petroleum subsidies. One of the existing legal bases is Presidential Regulation No. 5 of 2006 on National Energy Policy. This legal basis breaks down the search for new energy for the 2006-2025 period, targeting the achievement of energy diversity by 2025. Through a gradual reduction of petroleum, maximum 20% of petroleum and now becomes 52%, gas will be increased to 30%, coal will be increased to 33%, Geothermal 5%, biofuel to 5%, therefore new and renewable energy is increased to 5%.



Likewise, Indonesia's other national energy policies are accommodated in the Presidential Regulation No.79 year 2014 on the National Energy Policy (KEN). This regulation leads to a policy on national energy management based on principles of fairness, sustainability and environmental insight. Besides, it also prioritizes the use of alternative energy besides petroleum by minimizing the use of petroleum, and optimizing alternative energy in order to create energy independence in country and create national energy security (DEN, 2015: 8).

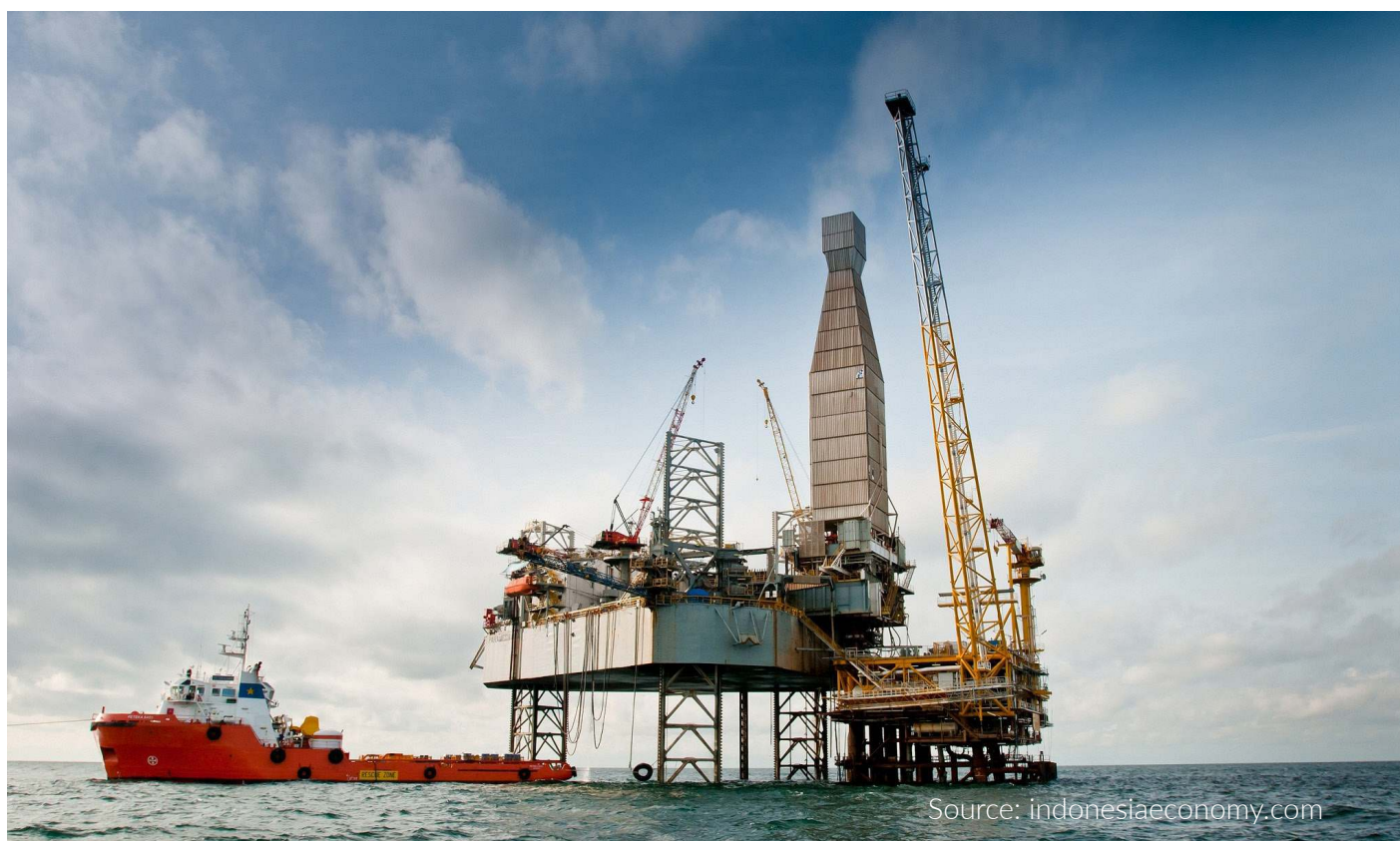
In order to fulfill domestic energy needs, Indonesia must have an energy supply reserve that can be used as a supply of energy in a certain time in case of energy crisis. This is the duty and role of the government to create a national energy policy in the framework of national energy security through

alternative energy, in addition to fossil energy in the form national energy policy in favor to the national interest.

Independence and national energy security can be achieved by realizing the independence of domestic energy management, which should cooperate with educational institutions, in the framework of the development of advanced technology needs, in order to optimize the production of alternative energy sources as a replacement for non-renewable fossil energy.

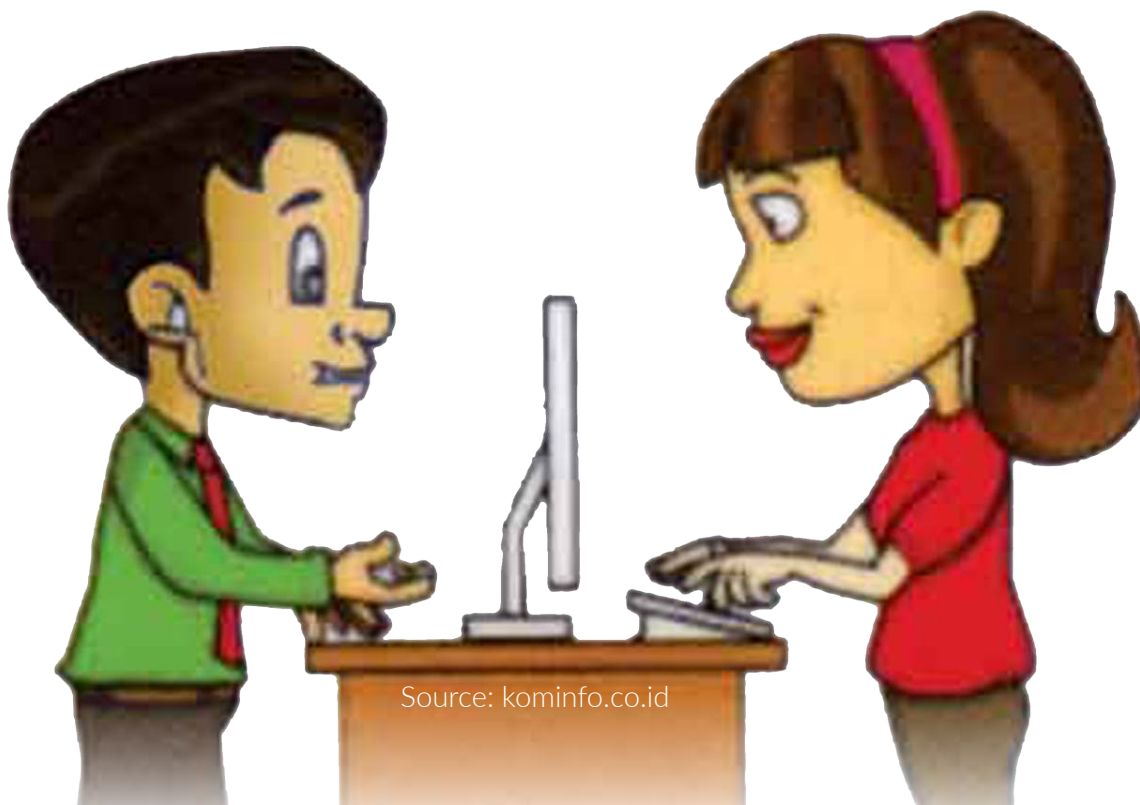
One of the efforts to improve long-term national energy security is through reducing dependence on non-renewable fossil energy, especially petroleum, by optimizing new energy sources such as; Natural Gas, Geothermal, Hydro, Biomass, Surya, Wind, Waves (Sea) as well as uranium, through alternative

energy development strategies in the framework of Indonesia's national energy security. The potential of this alternative energy can be utilized sustainably for the welfare of society in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, article 33 which states that; the earth and water and natural resources contained therein are controlled by the state and are utilized as much as possible for the prosperity of the Indonesian people. It is expected that alternative energy development strategies can save and hamper the reduction of the availability of fossil energy in Indonesia, thus creating national energy security for the welfare of Indonesian people.\*\*\*



Source: indonesiaeconomy.com





## THE IMPLEMENTATION OF CHANGE MANAGEMENT THROUGH THE ROLE OF INFORMATION AND DOCUMENTATION MANAGEMENT OFFICER (PPID) IN MANAGING INFORMATION TECHNOLOGY

By:

Lt Col Adm Bambang Kustiawan, S.E., M.M

Head of Public Relation and Administration Section of General  
Bureau Defence University

To fulfil the challenge of tasks supported by the demands of bureaucratic reforms along with the management of change, structuring, and setting up the apparatus management system, it is appropriate that the handling of information in modern organizations implement the Change Management. This is intended for the convenient of the execution of tasks by implementing the information technology.

The Information and Documentation Management Officer (PPID) who serves as the

manager and conveyor of the information and documentation of a public agency in accordance with the mandate of Law 14/2008 on the Disclosure of Public Information is absolutely requires the presence of the Change Management. These demands are fundamental to the current era of globalization which is also a barometer of PPID's ability to manage human resources as a driver of information. In relation to the previous statement, it is necessary to manage and develop the data management capabilities which ultimately as an instrument to compete.

Change Management is a relatively new concept that moves to transform organizations through, restructuring, reengineering, re-strategizing, acquisitions, employee reductions, quality programs, as well as cultural reform. With the supporting science and technology, PPID must be able to accommodate the need of its human resources. Through the implementation of new technologies or in the work environment to support the storage area, documentation, provision, and /or information services in the scope of PPID public agencies openly. With the presence of high quality

and professional PPID then through one door policy, it will be easier for the community who will submit the request for the information. One of important element in realizing open information technology management is the publics' right to obtain information in accordance with laws and regulations. The right to Information becomes very important because the more open management organization to be supervised by the public and the implementation is more accountable.

Change Management is something relatively new, even though it has been growing for a long time. The ideas regarding the change management have evolved

in previous years. Academic studies by some pioneer such as John P. Kotter in the early 70s, and then continued by Kotter together with S Cohen in the late 80s. According to Kottler, the Change Management is a change that is useful and significant for the organization. Kotter divided his study into two most fundamental things in determining the next journey. Both of these are the result of his writings at the Harvard Business Review that is very thrilling that (1) top command leaders read the list of errors that are often made when trying to create real change. (2) reader finds a very interesting 8-step change of frame. Based on the ideas, Kotter's writing is used as a road map and helps people

talk about transformation, change problems, and change strategy. Change Management by Kotter and Cohen consists of a number of practices used by organizations to identify, create, represent, and change what they do. In addition, Change Management consists of a form of organizational culture transformation, globalization, whether within an entire organization, an office, a department, or a working group.

Understanding of the role of PPID is not merely a matter of conveying an analysis to people to influence thinking, but rather an effort to help to see the truth in order to influence feelings. The association with the application







of Change Management is about change to understand why some organizations are far more successful in making future leaps than others.

### Change Management in Managing Information

One important aspect of Change Management that will always be there is a change of attitude and behaviour in order to build information technology. This can be seen in the data storage activities that originally in hard copy, to soft copy and all are centralized. So that all data both processed and unused are centralized in the data space in accordance with the field and the level of the discussed problem

solution. However, it is sometimes it is still often forgotten that the soft copy of data storage must be accompanied by the hard copy to be used as a backup for both raw and completed data.

As a public agency, nowadays PPID is also trying to create changes by information building through the concern of the organization. However, the Change Management in the organization requires a system / stage that can be used as a guide. Although it is not necessarily rigid in accordance with the stages that have been determined by Kotter, however, in general, this stage must be passed intensively even though not in a consecutive manner.

The successful role of PPID in pursuing organizational change will always be marked by the implementation of a number of skilled approaches. Successful efforts, however, have two characteristics: (1) leaders approach with the awareness of strengths and limitations and (2) assess and observe situations realistically.

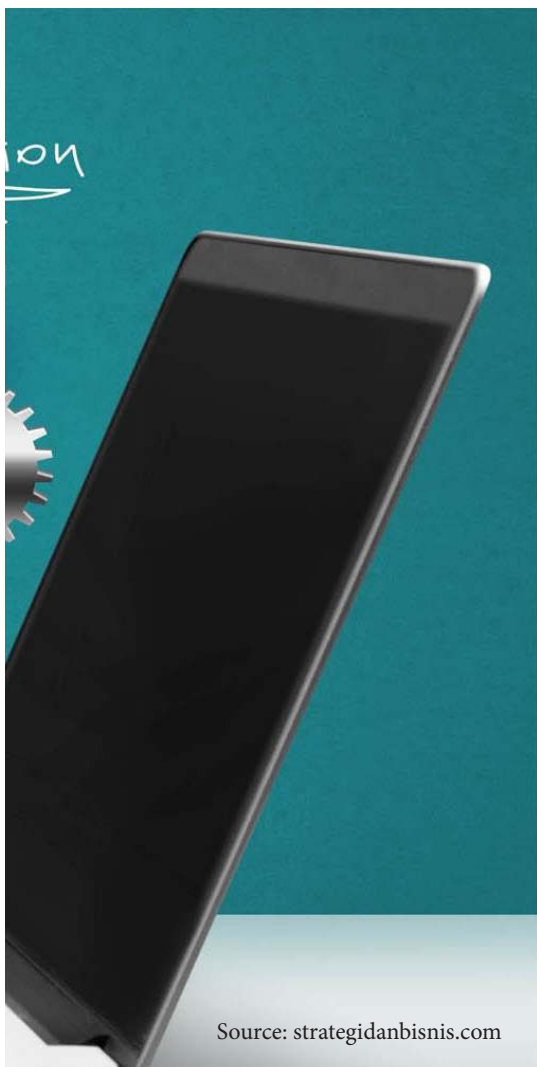
In the organizational reality there are two obstacles in organizational change from external and internal constraints. The external constraints are mainly created by rapid changes such as technological, economic, social, political and environmental changes. Changes to stakeholder requests, wants, needs, values and culture become the strength that imposes organizations to change and transform. Addressing these two sources of obstacles requires a high level of commitment, leadership, courage and sacrifice, proper planning and strategy, because without it all the work of reform will fail.

Kotter gives reasons why organizations can and need to change and improve, while some are thinking conversely, since the organization is able to implement the changes well. The method used in the successful transformation is based on a fundamental insight that major changes will not occur for a long list of reasons.

### Eight Steps of Change

Responding to the challenge, as stated on his book *Learning Change*, John Kotter (1996) mentioned the Eight Steps of Change. The strategies for change are by identifying the most common mistakes in making the changes effective. Kotter Model of Transformation in managing the transformation to succeed are as follows:

1. **Establishing a Sense of Urgency** (Creating a "sense of urgency"). Dynamic organizations require the systematic, good, and comprehensive management of information technology. However, there are several reasons behind the importance of changes in the management of information technology to develop the organization as follows:
  - a. **Information and Documentation Management Officer (PPID)**. The response of this change is still an onerous constraint in the former organizations that do not see the urgency of the change. The reasons for the rejection of change by the Leader are more general because all activities can still be handled. Therefore, the



Source: strategidanbisnis.com



tendency of self-satisfaction felt by the leadership of the performance becomes the reason for suspension for the management of information technology. The sense of complacency that happened to the former leadership is not without reason, because they feel that "technically", the management of information technology is still able to carry out its duties.

- b. The existence of an organizational unit. Assume that the task of managing information technology is just additional work. The greatest impact of the organization is the lack of clear data collection from year to year resulting in poor documentation and analysis.
- c. Comfort zone. Previously, with no visible crisis on the need of management of information technology is perceived as a comfort zone for leaders. It is still possible to carry out tasks at the tactical level that is sufficient for leaders regardless to the impact at the strategic level. Concern on how management of information technology succeed is also delayed from year to year.
- d. Long Term Evaluation, The information technology management handled by a small organization will not be effective since they will be busy analyzing each activity as well as the overall management of information technology that has been implemented

more strategically in the future that never seriously implemented.

## 2. Forming the Guiding Coalition.

The formation of this Coalition is carried out by inviting the think tank from some experience organizations in implementing information technology management. Besides, it provides some suggestions as the final consideration to be used for future decision making process.

## 3. Developing a Vision and Strategy.

The vision of Information technology manager is to be an orderly and sustainable management of information technology. The vision on one door policy, control the input and output of the management of information in support of the main task of defence. The development of the vision is increasingly needed because during the last decade it is actively involved in improving the relevant information and quality in the decision-making process of leadership. This vision is more strategic in carrying out information services, which is expected to create a transparent, effective, efficient and accountable and reliable organization management.

## 4. Communicating the Change Vision.

The changes vision can occur, with a shared sense of the desired future related to the understanding of the need for information technology management. Some of the implemented steps are as follows:

- a. PPID manages one-door information technology and disseminates the information technology management pattern by requiring computer-savvy organizers.
- b. Inviting internal coordination meetings between the Head of PPID and PPID executors as well as to the parties related to the management of information technology.
- c. Preach to all levels in Indonesia, publications, newspapers and networking sites related to the establishment of information technology.







**5. Empowering Employees for Broad Based Action.**

Empower the personnel capabilities by optimizing the involvement of all personnel and organizational elements.

**6. Generating Short Term Wins.**

Assignment of the service personnel to determine job description or known by the Work Process and Mechanism of each personnel. Preparation of the work process and mechanism to describe the duties, responsibilities and functions of the personnel in details as the responsibility of each job position.

**7. Consolidating Gains and Producing More Change.**

In a successful transformation, the steering coalition employs the credibility gained through short-term successes to move forward faster, even to handle more of the larger activities. The most important thing in PPID is helping people or bodies in obtaining the necessary information to support activities coordination. This stage has little resistance to the consolidation of the change due to rapid changing leadership, which is now different from the past as a result of unaccomplished desired

target from the previous leadership. The continuity of the old policy that is not yet accommodated by the new PPID makes the stages of achieving the goals of organizational formation stagnant.

**Anchoring New Approaches in the Culture.**

Leadership is the dominant cultural shaping factor in the organization. Therefore, the expected leadership of information technology management is a leader who is able to think strategically in providing input to the top command on the accurate information management.



This Eight Steps of Change reflects a logical sequence of how an organization especially PPID Public Agency can develop a Change Management strategy. The cycle emphasizes that Change Management is a process. Once a cycle has been reached, the organization must learn new things, because there is a link between generic strategies, change strategies, and Change Management.

The bureaucratic reform program that has been proclaimed by the government through the Ministry of PAN and RB has a high responsibility for the organization's wheels to be able to follow the dynamics of change in national, regional and international

environments. In line with the information technology revolution as an integral part of globalization demands every organization to utilize IT information technology management to improve organizational performance.

In that context, the scope of PPID as a manager of information and communication flows in the management of information technology is a process of formatted and directed. For example, through the PPID process in understanding the information that has been owned and find what kind of information needed by each internal circle within an organization can run better. By other means, it provides the facility of easy access to information from

within and outside the organization and provides it whenever it is needed. Later, the convenient in updating the latest information on the certain goals that have been set by the top management is easy to perceive. Thus, an organized information technology management system by integrating data and information technology as a media has already fulfilled. One of the important factors in supporting the change of office administration culture, which was originally a paper work gradually turned into paper less because it is supported by Information Technology facility. Such is the picture of the Change Management process to facilitate the implementation of the task of PPID in the management of information technology.\*\*\*





